



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN
MENTERI KEUANGAN

- Yth.
1. Para Menteri Kabinet Kerja
 2. Jaksa Agung Republik Indonesia
 3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
 4. Para Ketua/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
 5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara

SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR 4 TAHUN 2024
NOMOR 1/MK.2 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PEMANFAATAN
KLASIFIKASI RINCIAN *OUTPUT* DAN RINCIAN *OUTPUT*
DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. Sebagaimana amanat Pasal 34 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan menyusun format dan klasifikasi data Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).
2. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan menerapkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran melalui Surat Edaran Bersama Nomor S-122/MK.2/2020, Nomor B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, untuk selanjutnya disebut Pedoman RSPP.
3. Pedoman RSPP sebagaimana dimaksud telah menjadi pedoman dalam penyusunan Program, Kegiatan, dan Keluaran (*Output*) Kementerian/Lembaga beserta sasaran dan indikator serta informasi kinerja lainnya, yang akan digunakan dalam penyusunan Renja K/L, RKA-K/L, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sejak Tahun Anggaran 2021.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta menajamkan kualitas belanja Kementerian/Lembaga, perlu dilakukan penyempurnaan atas Pedoman RSPP dan Penggunaan KRO dan RO dengan menetapkan Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan Klasifikasi Rincian *Output* dan Rincian *Output* dalam Perencanaan dan Penganggaran.
5. Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan Klasifikasi Rincian *Output* dan Rincian *Output* dalam Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran Bersama ini disusun dan

ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan Klasifikasi Rincian *Output* dan Rincian *Output* dalam Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud, memuat kaidah penyusunan dan pemanfaatan referensi KRO, kaidah penyusunan RO, serta daftar referensi KRO beserta satuan penjelasan dan rekomendasi penuangan nomenklatur RO pada setiap referensi KRO.
7. Daftar referensi KRO sebagaimana dimaksud, selanjutnya menjadi referensi dalam sistem informasi di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.
8. Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output dalam Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Bersama ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, serta pemutakhiran informasi kinerja K/L pada Renja K/L dan RKA K/L sejak Tahun Anggaran 2025.

Surat Edaran Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. Demikian Surat Edaran Bersama ini disampaikan agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2024

a.n. Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional
Deputi Bidang Pendanaan
Pembangunan



Alexander Clasein Hasudungan
Siahaan

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Anggaran



Isa Rachmatarwata

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas.

Lampiran I
Surat Edaran Bersama Deputi
Bidang Pendanaan
Pembangunan atas nama
Menteri PPN/Kepala Bappenas,
dan Direktur Jenderal Anggaran
atas nama Menteri Keuangan
Tentang Pedoman Penyusunan
dan Pemanfaatan KRO dan RO
dalam Perencanaan Dan
Penganggaran
Nomor: 4 Tahun 2024
Nomor: 1/MK.2 Tahun 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PEMANFAATAN KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT DAN RINCIAN OUTPUT DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyelenggarakan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (PP Nomor 17 Tahun 2017), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan menyusun format dan klasifikasi data Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga. Penyusunan format dan klasifikasi data sebagaimana dimaksud telah dilakukan secara selaras melalui penetapan Surat Edaran Bersama Nomor S-122/MK.2/2020, Nomor B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (Pedoman RSPP). Pedoman RSPP sebagaimana dimaksud merupakan upaya Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan menyempurnakan desain perencanaan dan penganggaran melalui penyelarasan data dan klasifikasi yang digunakan pada Renja dan RKA Kementerian/Lembaga. Pedoman RSPP tersebut juga merupakan kebijakan pertama yang memperkenalkan dan memberlakukan Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) dan Rincian *Output* (RO) sebagai pengejawantahan struktur Keluaran (*Output*).

Sejak ditetapkannya Pedoman RSPP pada tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan secara berkala melakukan reviu atas penerapan RSPP pada Renja dan RKA Kementerian/Lembaga sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan hasil reviu tersebut, terdapat beberapa temuan mengenai ketidaksesuaian pemanfaatan KRO dan penuangan nomenklatur RO di beberapa Kementerian/Lembaga, seperti

pemanfaatan referensi KRO yang tidak sesuai output riil yang dihasilkan, nomenklatur RO belum menggambarkan barang/jasa produk akhir suatu kegiatan, nomenklatur RO tidak sesuai dengan KRO di atasnya, nomenklatur RO masih merujuk pada rumusan indikator, dan nomenklatur RO menggunakan rumusan yang terlalu umum (tidak merujuk pada kekhususan fokus/lokus dan tidak mencerminkan tugas dan fungsi unit kerja yang menghasilkannya). Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan juga menemukan bahwa penuangan KRO dan RO pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) serta penyusunan RO prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) belum menerapkan kaidah penyusunan KRO dan RO dengan optimal.

Menindaklanjuti temuan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan atas pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Surat Edaran Bersama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan atas nama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan Nomor B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 khususnya berkaitan dengan Pedoman Penyusunan KRO dan RO.

B. Tujuan

Penerapan Pedoman Penyusunan KRO dan RO dalam Perencanaan dan Penganggaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sehingga mendukung terwujudnya pemanfaatan APBN terutama belanja Kementerian/Lembaga dan Non-Kementerian/Lembaga secara lebih tajam, berkualitas dan tepat sasaran.

C. Ruang Lingkup

1. Kaidah Penyusunan dan Penetapan Referensi KRO;
2. Kaidah Pemanfaatan KRO dalam Perencanaan dan Penganggaran; dan
3. Kaidah Penyusunan RO dalam Perencanaan dan Penganggaran.

D. Dasar Hukum Penyusunan KRO dan RO dalam Perencanaan dan Penganggaran

Dasar hukum penerapan Pedoman Penyusunan KRO dan RO dalam Perencanaan dan Penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan

- Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029; dan
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

E. Kaidah Penyusunan dan Penetapan Referensi KRO

1. Kaidah Penyusunan Referensi KRO
 - a. Klasifikasi Rincian Output (KRO), yang merupakan kumpulan atas Keluaran (*Output*) Kementerian/Lembaga yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan Keluaran (*Output*) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis;
 - b. Karakteristik KRO, terdiri atas:
 - 1) Nomenklatur KRO berupa barang atau jasa;
 - 2) KRO merupakan pengelompokan atau klasifikasi RO yang sejenis;
 - 3) KRO bukan merupakan output riil yang menggambarkan pencapaian sasaran kegiatan secara langsung;
 - 4) KRO bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh banyak bahkan semua Kementerian/Lembaga;
 - 5) KRO mempunyai satuan tertentu;
 - 6) KRO bersifat standar dan tertutup sehingga Kementerian/Lembaga tidak dapat mengubah nomenklatur maupun satuan KRO, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan; serta
 - 7) KRO bersifat *comparable* dimana output, satuan, alokasi anggaran antar masing-masing KRO dapat diperbandingkan satu dengan lainnya.
 - c. Nomenklatur KRO disusun dengan mengacu pada:

- 1) jenis intervensi yang dilakukan Pemerintah guna memastikan pencapaian sasaran pembangunan, yang meliputi intervensi dalam bentuk kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum, kerangka investasi fisik dan kerangka investasi non-fisik; dan
 - 2) jenis barang/jasa yang mendukung administrasi pemerintahan internal Kementerian/Lembaga, antar Kementerian/Lembaga serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Nomenklatur KRO disusun dengan menggunakan kata baku sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta memperhatikan tata cara penulisan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI);
 - e. Batasan dan Ruang Lingkup KRO atas masing-masing bidang/sektor/tema program mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang mengatur bidang/sektor/tema program tersebut;
 - f. Nomenklatur KRO disusun dengan memperhatikan ruang lingkup pemanfaatan KRO di berbagai Kementerian/Lembaga dengan tugas, fungsi, sektor atau bidang serupa;
 - g. Nomenklatur KRO disusun dengan menghindari penggunaan:
 - 1) Rumusan aktivitas atau kegiatan, seperti "*Pembangunan*", "*Pengembangan*", "*Penyelenggaraan*", dst;
 - 2) Rumusan indikator atau alat ukur pencapaian keberhasilan, seperti "...yang dibangun", ".....yang dikembangkan", "..... yang diselenggarakan", dst;
 - 3) Nomenklatur unit kerja suatu Kementerian/Lembaga;
 - 4) Nomenklatur yang terlalu spesifik; dan
 - 5) Nomenklatur yang terlalu panjang.
 - h. Nomenklatur KRO dilengkapi dengan kode KRO dan satuan KRO;
 - i. Kode KRO terdiri atas kombinasi 3 (tiga) digit huruf yang mencerminkan kelompok dan jenis KRO, dengan rincian:
 - 1) huruf kesatu menggambarkan kelompok/grup KRO, dengan ketentuan:
 - a) huruf A menggambarkan KRO pada kelompok/grup kerangka regulasi;
 - b) huruf B menggambarkan KRO pada kelompok/grup menggambarkan pelayanan umum;
 - c) huruf C menggambarkan KRO pada kelompok/grup kerangka investasi fisik;
 - d) huruf D menggambarkan KRO pada kelompok/grup kerangka investasi non-fisik;
 - e) huruf E menggambarkan KRO pada kelompok/grup administrasi pemerintahan internal Kementerian/Lembaga; dan
 - f) huruf F menggambarkan KRO pada kelompok/grup administrasi pemerintahan antar

Kementerian/Lembaga dan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
dalam hal KRO bersifat prioritas, huruf kesatu pada KRO diawali dengan huruf P sampai huruf U.

- 2) huruf kedua menggambarkan jenis KRO yang berada di bawah kelompok/grup KRO; dan
 - 3) huruf ketiga menggambarkan seri KRO dalam 1 (satu) jenis KRO dimulai dari huruf A.
- j. Satuan KRO merupakan satuan yang berlaku umum dan/atau sudah diuji kelayakannya;
- k. Setiap KRO dapat memiliki lebih dari 1 (satu) jenis satuan KRO;
- l. Nomenklatur satuan KRO disusun dengan memperhatikan kebutuhan Kementerian/Lembaga dalam mengukur kinerja dan volume terkait pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan;
- m. Nomenklatur KRO dan satuan KRO disusun oleh unit kerja yang mengoordinasikan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan; dan
- n. Nomenklatur KRO dan satuan KRO dapat diusulkan oleh Kementerian/Lembaga, dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan nomenklatur KRO dan satuan KRO melalui Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/Sekretaris atau Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/Sekretaris dan ditujukan kepada deputi mitra kerja c.q. direktorat mitra kerja K/L di Kementerian PPN/Bappenas dan Direktur Jenderal Anggaran c.q. direktorat mitra kerja K/L di Kementerian Keuangan;
 - 2) Kementerian/Lembaga bersama-sama dengan direktorat mitra kerja K/L di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan membahas dan menyepakati usulan nomenklatur KRO dan satuan KRO dalam Pertemuan Tiga Pihak;
 - 3) dalam hal usulan disepakati, hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Tiga Pihak dan disampaikan kepada unit kerja yang mengoordinasikan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan;
 - 4) unit kerja yang mengoordinasikan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan membahas usulan sebagaimana kesepakatan dalam Berita Acara Pertemuan Tiga Pihak; dan
 - 5) dalam hal disetujui, usulan sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai Kaidah Penetapan Referensi KRO

sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.

2. Kaidah Penetapan Referensi KRO

- a. Nomenklatur KRO dan satuan KRO yang telah disusun sesuai Kaidah Umum Penyusunan Referensi KRO sebagaimana tercantum pada Lampiran ini selanjutnya ditetapkan sebagai referensi standar yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga;
- b. Penetapan KRO dan satuan KRO sebagai referensi dilakukan melalui Surat Edaran Bersama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan atas nama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan. Daftar KRO dan satuan KRO yang berlaku saat ini tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Bersama ini;
- c. Dalam hal dibutuhkan, unit kerja yang mengoordinasikan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dapat melakukan pemutakhiran dan/atau penyempurnaan atas Daftar KRO dan satuan KRO yang tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Bersama ini;
- d. Penetapan pemutakhiran dan/atau penyempurnaan atas Daftar KRO dan satuan KRO sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui surat bersama yang ditandatangani oleh pejabat tinggi pratama pada unit kerja yang mengoordinasikan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan;
- e. Pemutakhiran dan/atau penyempurnaan atas Daftar KRO dan satuan KRO yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku dan menjadi acuan resmi bagi Kementerian/Lembaga sejak tanggal ditandatanganinya surat bersama tersebut.

F. Kaidah Pemanfaatan Referensi KRO dalam Perencanaan dan Penganggaran

1. Referensi KRO sebagaimana dimaksud dalam Lampiran ini mencakup nomenklatur yang tercantum pada Daftar KRO dan satuan KRO.
2. Pemanfaatan referensi KRO didasarkan pada karakteristik penerima manfaat RO di bawahnya, dengan ketentuan:
 - a. KRO dengan kode awal A, B, C, D dan F dimanfaatkan untuk mengelompokkan RO yang penerima manfaatnya adalah pihak eksternal Kementerian/Lembaga; dan
 - b. KRO dengan kode awal E dimanfaatkan untuk mengelompokkan RO yang penerima manfaatnya adalah pihak internal Kementerian/ Lembaga.
3. Pemanfaatan referensi KRO tidak dibatasi pada sifat program dan kegiatan (dukman dan teknis) namun tetap memperhatikan tugas dan fungsi unit kerja.
4. Pemanfaatan referensi KRO dengan kode awal E (internal) tidak

dapat digunakan untuk menampung RO yang mendukung prioritas nasional.

5. Referensi KRO sebagaimana dimaksud dimanfaatkan oleh:
 - a. Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), Renja, serta RKA dan melakukan revisi informasi kinerja anggaran;
 - b. Kementerian PPN/Bappenas dalam mengidentifikasi nomenklatur rancangan RO Prioritas yang disusun pada RPJMN, RKP, dan Lampiran Surat Bersama Pagu Indikatif mengenai rincian prioritas di Kementerian/Lembaga, menelaah Renstra, Renja, RKA, dan revisi informasi kinerja anggaran serta menyusun kebijakan perencanaan pembangunan; dan
 - c. Kementerian Keuangan dalam menelaah Renja, RKA dan revisi informasi kinerja anggaran.
6. Dalam memanfaatkan referensi KRO untuk penyusunan Renstra, Renja dan RKA serta revisi informasi kinerja:
 - a. Kementerian/Lembaga terlebih dahulu mengidentifikasi referensi KRO yang akan digunakan sesuai tugas dan fungsi unit kerja di Kementerian/Lembaga; dan
 - b. Kementerian/Lembaga menggunakan referensi KRO dengan mempertimbangkan barang atau jasa produk akhir yang dihasilkan oleh setiap unit kerja.

G. Kaidah Penyusunan RO dalam Perencanaan dan Penganggaran

1. Kaidah Umum Rincian *Output*
 - a. Rincian Output (RO) merupakan Keluaran (*Output*) riil yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga, yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan;
 - b. Nomenklatur RO merupakan nomenklatur Barang atau Jasa produk akhir, yang bersifat unik dan spesifik serta berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu;
 - c. Nomenklatur RO mencerminkan tugas dan fungsi unit kerja yang menghasilkannya dan dukungan langsung unit kerja penghasil RO terhadap pencapaian sasaran kegiatan;
 - d. Nomenklatur RO dapat berbeda antar Kementerian/Lembaga dan antar unit kerja di Kementerian/Lembaga;
 - e. Nomenklatur RO disusun dengan memperhatikan karakteristik khusus pada masing-masing bidang/sektor/tema atas program yang diampu oleh Kementerian/Lembaga atau unit kerja di Kementerian/Lembaga;
 - f. Nomenklatur RO disusun dengan memperhatikan:
 - 1) Tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang

- Kementerian/Lembaga;
- 2) Tugas dan fungsi unit kerja pelaksana Kegiatan yang menghasilkan Keluaran (*Output*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri/Lembaga/Badan terkait struktur organisasi dan tata kelola Kementerian/Lembaga;
 - 3) Peraturan lainnya terkait bidang/sektor/tema program yang diampu oleh Kementerian/Lembaga tersebut; dan
 - 4) Arahan dan penugasan khusus Presiden terhadap Kementerian/Lembaga.
- g. Nomenklatur RO disusun dengan menggunakan kata baku sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta memperhatikan tata cara penulisan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
2. Kaidah Penyusunan Rincian Output oleh Kementerian/Lembaga
- Dalam menyusun RO, Kementerian/Lembaga melakukan penyusunan kode, nomenklatur, unit organisasi dan unit eselon II yang mengampu RO tersebut, penandaan (*tagging*) terkait, serta memilih satuan.
- a. Kode RO
- 1) Kementerian/Lembaga menggunakan 3 (tiga) digit angka Arab dimulai dari 001, 002, 003 dan seterusnya; dan
 - 2) Dalam hal RO yang dihasilkan telah memiliki standar biaya keluaran, Kementerian/Lembaga menyusun 3 (tiga) digit kode RO dengan rincian 1 (satu) digit huruf diikuti 2 (dua) digit angka Arab.
- b. Nomenklatur RO
- 1) Kementerian/Lembaga menyusun nomenklatur RO yang menggambarkan:
 - a) barang atau jasa produk akhir yang dihasilkan oleh unit kerja eselon II di suatu Kementerian/Lembaga; dan
 - b) output riil yang bersifat spesifik dan unik sesuai fokus, lokasi khusus serta tugas dan fungsi unit kerja eselon II penghasil RO.
 - 2) Kementerian/Lembaga menyusun nomenklatur RO sesuai Kaidah Umum Penyusunan Rincian Output sebagaimana tercantum pada Lampiran I pada SEB ini;
 - 3) Dalam menyusun nomenklatur RO, Kementerian/Lembaga memperhatikan keterkaitan antara RO yang dihasilkan dengan nomenklatur dan satuan KRO yang dipilih;
 - 4) Dalam menyusun nomenklatur RO, Kementerian/Lembaga tidak menggunakan:
 - a) Rumusan aktivitas atau kegiatan, seperti "*Penyelenggaraan*", "*Penyusunan*", dst;-
 - b) Rumusan indikator / alat ukur pencapaian

keberhasilan RO, seperti "...yang diselenggarakan", "...yang disusun", dst. Adapun rumuan alat ukur sebagaimana dimaksud dituangkan dalam level indikator RO;

- c) Nomenklatur unit kerja penghasil RO, seperti "...Wilayah I", "...Direktorat XXX", dst;
- d) Rumusan barang atau jasa yang masih bersifat produk antara (bukan produk final). Adapun rumuan barang atau jasa yang masih bersifat produk antara dituangkan dalam level komponen.

Contoh:

- 1) rumusan "analisis" dan "kajian" pada RO Kebijakan belum menggambarkan barang atau jasa final, melainkan menggambarkan barang atau jasa produk antara, sehingga penuangannya perlu disempurnakan menjadi sebagai berikut:

RO: Kebijakan tentang xxxxx

Komponen: Analisis xxxxx

Kajian xxxxx

- 2) rumusan "pelaksanaan", "penyelenggaraan", "implementasi" pada RO terkait pelayanan publik, kerjasama, infrastruktur dan lainnya juga belum menggambarkan barang atau jasa final, melainkan menggambarkan aktivitas pembentuk RO, sehingga penuangannya perlu disempurnakan menjadi sebagai berikut:

RO: Jalan Bebas Hambatan

Komponen: Pengadaan Lahan Pengembangan Jalan Bebas Hambatan;

Konstruksi Pengembangan Jalan Bebas Hambatan;

Pengadaan Lahan Pembangunan

Jalan Bebas Hambatan;

Konstruksi Pembangunan Jalan

Bebas Hambatan;

RO: Kerja Sama xxxxxx

Komponen: Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama xxxxx;

- e) Rumusan lokasi wilayah administratif (provinsi/kab/kota) kecuali RO dengan penugasan khusus kewilayahan berdasarkan RPJMN dan/atau RKP.

Contoh lokasi administratif berdasarkan penugasan RPJMN yang diperkenankan:

(ilustrasi)

RO Bandar Udara Malang

Dalam hal tidak terdapat penugasan khusus

kewilayahan berdasarkan RPJMN dan/atau RKP, rumusan RO "Bandar Udara Malang" disempurnakan menjadi:

(ilustrasi)

RO "Bandar Udara"

Lokasi RO "Kab. Malang"

- f) Rumusan sumber pendanaan yang digunakan untuk menghasilkan RO, seperti "... (PHLN)", "... (PNBP)", dst. Adapun perbedaan pemanfaatan sumber pendanaan pada RO dituangkan dalam level komponen; dan
 - g) Rumusan yang mencerminkan perkiraan kemampuan militer, pertahanan negara dan intelijen seperti nama dan spesifikasi alat senjata, spesifikasi peralatan intelijen, spesifikasi pangkalan dan instalasi militer/intelijen, dst.
- c. Unit Organisasi dan Unit Eselon II
- 1) Dalam menyusun RO, Kementerian/Lembaga menentukan Unit Organisasi, Unit Eselon II yang menghasilkan RO; dan
 - 2) Dalam menyusun RO, Kementerian/Lembaga memastikan bahwa 1 (satu) RO dihasilkan oleh 1 (satu) Unit Eselon II.
- d. Satuan
- Dalam menyusun RO, Kementerian/Lembaga menentukan satuan yang akan digunakan untuk menghitung jumlah RO berdasarkan daftar satuan pada KRO yang dipilih.
- e. Penandaan (*tagging*)
- Dalam menyusun RO, Kementerian/Lembaga menentukan penandaan (*tagging*) seperti dukungan terhadap Prioritas Pembangunan, tematik APBN, dan penandaan lain yang ditetapkan kemudian.

H. Tindak Lanjut Penerapan Pedoman Penyusunan KRO dan RO dalam Perencanaan dan Penganggaran

Pedoman Penyusunan KRO dan RO dalam Perencanaan dan Penganggaran diberlakukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, serta pemutakhiran informasi kinerja K/L pada Renja K/L dan RKA K/L sejak tahun anggaran 2025. Sebagai tindak lanjut atas diterapkannya pedoman ini:

- 1. Kementerian/Lembaga melakukan penyusunan dan revisi atas KRO dan RO pada Renstra, Renja dan RKA sesuai kaidah pemanfaatan KRO dan penyusunan RO sebagaimana tercantum pada bagian F dan G pada Lampiran ini;
- 2. Kementerian PPN/Bappenas melakukan penyusunan RO prioritas pada RPJMN, RKP dan Lampiran Surat Bersama Pagu Indikatif mengenai rincian prioritas di Kementerian/Lembaga sesuai kaidah

- penyusunan RO sebagaimana tercantum pada bagian G pada Lampiran ini;
3. Direktorat mitra kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melakukan penelaahan atas KRO dan RO pada Renstra, Renja dan RKA sesuai kaidah pemanfaatan KRO dan penyusunan RO sebagaimana tercantum pada bagian F dan G pada Lampiran ini;
 4. Dalam hal diperlukan, Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan referensi KRO selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran ini sesuai dengan kaidah penyusunan referensi dan penetapan referensi KRO yang tercantum pada bagian E pada Lampiran ini;
 5. Dalam hal diperlukan, unit kerja yang mengoordinasikan kebijakan, sistem dan prosedur perencanaan dan pengalokasian anggaran pendanaan pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas dan unit kerja yang mengoordinasikan kebijakan dan prosedur sistem penganggaran di Kementerian Keuangan dapat menetapkan referensi KRO selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran ini sesuai dengan kaidah penyusunan referensi dan penetapan referensi KRO yang tercantum pada bagian E pada Lampiran ini;
 6. Dalam hal diperlukan, unit kerja yang mengoordinasikan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dapat menuangkan ketentuan-ketentuan pada Pedoman Penyusunan KRO dan RO dalam peraturan menteri tentang penyusunan Renstra, Renja dan RKA K/L sesuai kewenangannya;
 7. Dalam hal diperlukan, unit kerja yang mengoordinasikan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dapat melakukan penyempurnaan atas ketentuan yang tercantum pada Pedoman Penyusunan KRO dan RO melalui Surat Edaran Bersama.
 8. Dalam hal output yang dihasilkan oleh BA BUN berkarakteristik sama dengan yang dihasilkan oleh BA K/L dan relevan untuk digunakan dalam BA BUN, BABUN dapat menggunakan Daftar KRO yang tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Bersama ini dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggarannya.

a.n. Menteri PPN/Kepala Bappenas
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan



Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Anggaran



Isa Rachmatarwata

Lampiran II
Surat Edaran Bersama Deputi Bidang Pendanaan
Pembangunan atas nama Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Direktur
Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Tentang Pedoman
Penyusunan dan Pemanfaatan KRO dan RO dalam Perencanaan Dan
Penggangan
Nomor: 4 Tahun 2024
Nomor: 1/MK.2 Tahun 2024

DAFTAR KRO DAN SATUAN

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	SATUAN
A	Kerangka Regulasi	A	Peraturan	1	AAA	PAA	Undang-Undang	UU, RUU
				2	AAB	PAB	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Perppu
				3	AAC	PAC	Peraturan Pemerintah	PP, RPP
				4	AAD	PAD	Peraturan Presiden	PerPres, Raperpres
				5	AAE	PAE	Keputusan Presiden	KepPres
				6	AAF	PAF	Instruksi Presiden	Inpres
				7	AAG	PAG	Peraturan Menteri dan Kepala Lembaga	PerMen, PerKa
				8	AAH	PAH	Peraturan lainnya	Peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan
		B	Kebijakan/Kajian	9	ABA	PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Rekomendasi Kebijakan
				10	ABB	PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	Rekomendasi Kebijakan
				11	ABC	PBC	Kebijakan Bidang Politik	Rekomendasi Kebijakan
				12	ABD	PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Rekomendasi Kebijakan
				13	ABE	PBE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rekomendasi Kebijakan
				14	ABF	PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi Kebijakan
				15	ABG	PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	Rekomendasi Kebijakan
				16	ABH	PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan, dan Kebudayaan	Rekomendasi Kebijakan
				17	ABI	PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	Rekomendasi Kebijakan
				18	ABJ	PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Rekomendasi Kebijakan
				19	ABK	PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri, dan UMKM	Rekomendasi Kebijakan
				20	ABL	PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Rekomendasi Kebijakan
				21	ABM	PBM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	Rekomendasi Kebijakan
				22	ABN	PBN	Kebijakan Bidang Sosial	Rekomendasi Kebijakan
				23	ABO	PBO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	Rekomendasi Kebijakan
				24	ABP	PBP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	Rekomendasi Kebijakan
				25	ABQ	PBQ	Kebijakan Bidang Aparatur	Rekomendasi Kebijakan
				26	ABR	PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan
				27	ABS	PBS	Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Rekomendasi Kebijakan
				28	ABT	PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Rekomendasi Kebijakan
				29	ABU	PBU	Kebijakan Bidang Tenaga Nuklir	Rekomendasi Kebijakan
				30	ABV	PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	Rekomendasi Kebijakan
				31	ABW	PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	Rekomendasi Kebijakan
		C	Perizinan	32	ACA	PCA	Perizinan Produk	Produk
				33	ACB	PCB	Perizinan Masyarakat	Orang
				34	ACC	PCC	Perizinan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
				35	ACD	PCD	Perizinan Lembaga	Institusi, Lembaga, Badan Usaha
				36	ACE	PCE	Perizinan Profesi	Orang
		D	Akreditasi, Standarisasi dan Sertifikasi	37	ADA	PDA	Standarisasi Produk	Produk
				38	ADB	PDB	Akreditasi Produk	Produk
				39	ADC	PDC	Sertifikasi Produk	Produk
				40	ADD	PDD	Standarisasi Lembaga	Lembaga
				41	ADE	PDE	Akreditasi Lembaga	Lembaga
				42	ADF	PDF	Sertifikasi Lembaga	Lembaga, Badan Usaha
				43	ADG	PDG	Standarisasi Profesi dan SDM	Orang
				44	ADI	PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	Orang
		E	Koordinasi dan Kerja sama	45	AEA	PEA	Koordinasi	Kegiatan
				46	AEB	PEB	Forum	Forum
				47	AEC	PEC	Kerja sama	Kesepakatan
				48	AED	PED	Perjanjian	Perjanjian
				49	AEE	PEE	Kemitraan	Kesepakatan
				50	AEF	PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	Orang
				51	AEG	PEG	Konferensi dan Event	Kegiatan
				52	AEH	PEH	Promosi	Promosi
		F	NSPK	53	AFA	PFA	Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria	NSPK
B	Kerangka Pelayanan Umum	A	Pelayanan Publik	54	BAA	QAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Orang, Akta, Bidang, Laporan
				55	BAB	QAB	Pelayanan Publik Kepada Lembaga	Lembaga
				56	BAC	QAC	Pelayanan Publik Kepada Badan Usaha	Badan Usaha

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	SATUAN
				57	BAD	QAD	Pelayanan Publik Kepada Industri	Industri
				58	BAE	QAE	Pelayanan Publik Kepada UMKM	UMKM
				59	BAF	QAF	Pelayanan Publik Kepada Koperasi	Koperasi
				60	BAG	QAG	Pelayanan Publik Kepada LSM	LSM
				61	BAH	QAH	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan
		B	Layanan Bantuan Hukum	62	BBA	QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Orang
				63	BBB	QBB	Layanan Bantuan Hukum Lembaga	Institusi, Lembaga
				64	BBC	QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
				65	BBD	QBD	Layanan Bantuan Hukum Badan Usaha	Badan usaha
		C	Penanganan Perkara Hukum	66	BCA	QCA	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara
				67	BCB	QCB	Perkara Hukum Lembaga	Perkara
				68	BCC	QCC	Perkara Hukum Kelompok Masyarakat	Perkara
				69	BCD	QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	Perkara
				70	BCE	QCE	Penanganan Perkara	Perkara
		D	Fasilitasi dan Pembinaan Publik	71	BDA	QDA	Fasilitasi dan Pembinaan BUMN	BUMN
				72	BDB	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga
				73	BDC	QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Orang
				74	BDD	QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
				75	BDE	QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	Keluarga
				76	BDF	QDF	Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	Koperasi
				77	BDG	QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM
				78	BDH	QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Badan Usaha
				79	BDI	QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Industri
				80	BDJ	QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start up	Start Up
		E	Bantuan	81	BEA	QEA	Bantuan Masyarakat	Orang
				82	BEB	QEB	Bantuan Keluarga	Keluarga
				83	BEE	QEE	Bantuan Penanggulangan Kebencanaan	Paket
				84	BEH	QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
				85	BEI	QEI	Bantuan Lembaga	Lembaga
				86	BEN	QEN	Bantuan Peserta Didik	Orang
				87	BEO	QEO	Bantuan Produk dan Peralatan	Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor
		F	Subsidi	88	BFA	QFA	Subsidi Kepada Masyarakat	Orang
				89	BFB	QFB	Subsidi Kepada Lembaga	Lembaga
				90	BFC	QFC	Subsidi Kepada Keluarga	Keluarga
		G	Tata Kelola Kelembagaan Publik	91	BGA	QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	Lembaga
				92	BGB	QGB	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Sosial dan Budaya	Lembaga
				93	BGC	QGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	Lembaga
				94	BGD	QGD	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	Lembaga
				95	BGE	QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Lembaga
				96	BGF	QGF	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pertahanan dan Keamanan	Lembaga
		H	Operasi	97	BHA	QHA	Operasi Bidang Pertahanan	Operasi
				98	BHB	QHB	Operasi Bidang Keamanan	Operasi, Hari Operasi
				99	BHC	QHC	Operasi Bidang Penanggulangan Bencana	Operasi
				100	BHD	QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	Operasi
		I	Pengawasan dan Pengendalian	101	BIA	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	Produk
				102	BIB	QIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	Orang
				103	BIC	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Lembaga
				104	BID	QID	Pengawasan dan Pengendalian Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
				105	BIE	QIE	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah
				106	BIF	QIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	Layanan
				107	BIG	QIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	Layanan
				108	BIH	QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Badan Usaha
				109	BIJ	QIJ	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	Hektar, Layanan
		J	Penyidikan dan Pengujian	110	BJA	QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	Produk
				111	BJB	QJB	Penyidikan dan Pengujian Peralatan	Unit
				112	BJC	QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	Sampel
		K	Pemantauan Lapangan	113	BKA	QKA	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	Orang, Kelompok Masyarakat
				114	BKB	QKB	Pemantauan produk	Produk
				115	BKC	QKC	Pemantauan lembaga	Lembaga
		L	Persidangan	116	BLA	QLA	Persidangan Lembaga Legislatif	sidang
				117	BLB	QLB	Persidangan Lembaga Eksekutif	sidang
				118	BLC	QLC	Persidangan Lembaga Yudikatif	sidang
		M	Informasi dan Komunikasi Publik	119	BMA	QMA	Data dan Informasi Publik	Peta, Data, Dokumen
				120	BMB	QMB	Komunikasi Publik	Layanan
C	Kerangka Investasi Fisik	A	Sarana	121	CAA	RAA	Sarana Bidang Pendidikan	Unit, Paket
				122	CAB	RAB	Sarana Bidang Kesehatan	Unit, Paket
				123	CAC	RAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat	Unit, Paket
				124	CAD	RAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara	Unit, Paket
				125	CAE	RAE	Sarana Bidang Konektivitas Laut	Unit

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	SATUAN
				126	CAF	RAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	Unit, Paket
				127	CAG	RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	Unit
				128	CAH	RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	Unit
				129	CAI	RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	Unit
				130	CAJ	RAJ	Sarana Bidang Ketenagakerjaan	Unit
				131	CAK	RAK	Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	Unit, Paket
				132	CAL	RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	Unit
				133	CAM	RAM	Sarana Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	Unit
				134	CAN	RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit
				135	CAO	RAO	Sarana Bidang IPTEK	Unit
				136	CAP	RAP	Sarana Bidang Penanggulangan Bencana	Unit
				137	CAQ	RAQ	Sarana Bidang Hukum	Unit
		B	Prasarana	138	CBA	RBA	Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	Unit, km
				139	CBB	RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	Unit, Hektar
				140	CBC	RBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	km
				141	CBD	RBD	Prasarana Bidang Konektivitas Laut	Unit
				142	CBE	RBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Unit
				143	CBF	RBF	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	m
				144	CBG	RBG	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	Unit
				145	CBH	RBH	Prasarana Bidang Penanggulangan Bencana	Unit
				146	CBI	RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	Unit
				147	CBJ	RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit
				148	CBK	RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit
				149	CBL	RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	Unit
				150	CBM	RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	Unit
				151	CBN	RBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Unit
				152	CBO	RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	Hektar, Bidang
				153	CBP	RBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat	Unit
				154	CBQ	RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	Unit
				155	CBR	RBR	Dukungan Teknis	Dokumen
				156	CBS	RBS	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	km
				157	CBT	RBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit, Kab/Kota, Kecamatan, Titik/Lokasi
				158	CBU	RBU	Prasarana Bidang IPTEK	Unit
				159	CBV	RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	Unit
				160	CBW	RBW	Prasarana Bidang Hukum	Unit
		C	OP Sarana	161	CCA	RCA	OP Sarana Bidang Pendidikan	Unit, Paket
				162	CCB	RCB	OP Sarana Bidang Kesehatan	Unit, Paket
				163	CCC	RCC	OP Sarana Bidang Konektivitas Darat	Unit, Paket
				164	CCD	RCD	OP Sarana Bidang Konektivitas Udara	Unit, Paket
				165	CCE	RCE	OP Sarana Bidang Konektivitas Laut	Unit
				166	CCF	RCF	OP Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	Unit, Paket
				167	CCG	RCG	OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	Unit
				168	CCH	RCH	OP Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	Unit
				169	CCI	RCI	OP Sarana Pengembangan Kawasan	Unit
				170	CCJ	RCJ	OP Sarana Bidang Ketenagakerjaan	Unit
				171	CCK	RCK	OP Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	Unit, Paket
				172	CCL	RCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit
				173	CCM	RCM	OP Sarana Bidang Penanggulangan Bencana	Unit
				174	CCN	RCN	OP Sarana Bidang IPTEK	Unit
		D	OP Prasarana	175	CDA	RDA	OP Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	km
				176	CDB	RDB	OP Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	Unit, Hektar
				177	CDC	RDC	OP Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	km
				178	CDD	RDD	OP Prasarana Bidang Konektivitas Laut	Unit
				179	CDE	RDE	OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Unit
				180	CDF	RDF	OP Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	m

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	SATUAN
				181	CDG	RDG	OP Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	Unit
				182	CDH	RDH	OP Prasarana Bidang Penanggulangan Bencana	Unit
				183	CDI	RDI	OP Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	Unit
				184	CDJ	RDJ	OP Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit
				185	CDK	RDK	OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	Unit
				186	CDL	RDL	OP Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	Unit
				187	CDM	RDM	OP Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	Unit
				188	CDN	RDN	OP Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Unit
				189	CDO	RDO	OP Prasarana Pengembangan Kawasan	Hektar, Bidang
				190	CDP	RDP	OP Prasarana Bidang Konektivitas Darat	Unit
				191	CDQ	RDQ	OP Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	Unit
				192	CDR	RDR	OP Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	km
				193	CDS	RDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit, Kab/Kota, Kecamatan, Titik/Lokasi
				194	CDT	RDT	OP Prasarana Bidang IPTEK	Unit
				195	CDU	RDU	OP Prasarana Bidang Hukum	Unit
				196	CDV	RDV	OP Prasarana Bidang Kesehatan	Unit
		E	Konservasi	197	CEA	REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Hektar
				198	CEB	REB	Konservasi Jenis/Spesies	Spesies, Lokasi
D	Kerangka investasi SDM dan Sosial Ekonomi	A	Pendidikan Vokasi	199	DAA	SAA	Pendidikan Vokasi Bidang Komunikasi dan Informatika	Orang
				200	DAB	SAB	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang
				201	DAC	SAC	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	Orang
				202	DAD	SAD	Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Orang
				203	DAE	SAE	Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Orang
				204	DAF	SAF	Pendidikan Vokasi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Orang
				205	DAG	SAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri	Orang
		B	Pendidikan	206	DBA	SBA	Pendidikan Tinggi	Orang
				207	DBB	SBB	Pendidikan Menengah	Orang
				208	DBC	SBC	Pendidikan Dasar	Orang
				209	DBD	SBD	Pendidikan Pra-Sekolah	Orang
				210	DBE	SBE	Pendidikan Non Gelar	Orang
		C	Pelatihan	211	DCA	SCA	Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	Orang
				212	DCB	SCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang
				213	DCC	SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	Orang
				214	DCD	SCD	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Orang
				215	DCE	SCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Orang
				216	DCF	SCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Orang
				217	DCG	SCG	Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Orang
				218	DCH	SCH	Pelatihan Bidang Industri	Orang
				219	DCI	SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	Orang
				220	DCJ	SCJ	Pelatihan Bidang Sosial	Orang
				221	DCK	SCK	Pelatihan Bidang Penanggulangan Bencana	Orang
				222	DCL	SCL	Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif	Orang
				223	DCM	SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	Orang
				224	DCN	SCN	Pelatihan Bidang IPTEK	Orang
				225	DCO	SCO	Pelatihan Vokasi	Orang
		D	Penelitian dan Pengembangan	226	DDA	SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	Produk
				227	ddb	SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa
				228	DDC	SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	Model, Desain
				229	DDD	SDD	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	Kekayaan Intelektual
E	Administrasi Pemerintahan internal K/L	B	Dukungan Manajemen Internal	230	EBA		Layanan Manajemen Dukungan Internal	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
				231	EBB		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit, m2, Paket
				232	EBC		Layanan Manajemen SDM Internal	Orang, Layanan, Rekomendasi
				233	EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
F	Administrasi Pemerintahan internal Pemerintahan (antar KL dan	A	Tata Kelola Pemerintahan	234	FAA	UAA	Kearsipan	Arsip
				235	FAB	UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi
				236	FAC	UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Orang
				237	FAD	UAD	Perencanaan dan Penganggaran	Layanan, Dokumen
				238	FAE	UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Laporan, Layanan

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	SATUAN
	antar Pem Pusat Daerah)			239	FAF	UAF	Pemeriksaan Keuangan Negara	Laporan, Layanan
				240	FAG	UAG	Pengawasan Pembangunan	Laporan, Layanan
				241	FAH	UAH	Pengelolaan Keuangan Negara	Layanan
				242	FAI	UAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	Lembaga
				243	FAJ	UAJ	Benda Meterai dan Cukai	Keping, Lembar
				244	FAK	UAK	Pengelolaan Aset BUN	Unit, Aset
				245	FAL	UAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	Dokumen, Kegiatan
				246	FAM	UAM	Hasil Kelolaan Dana	Rupiah, Hektar, Orang, Usaha Mikro, milyar, Dokumen, Kilo liter
		B	Pembinaan Pemerintah Daerah dan Desa	247	FBA	UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota
				248	FBB	UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	Desa, Desa/Kelurahan

a.n. Menteri PPN/Kepala Bappenas
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan



Secnaider, Clascin Hasudungan Siahaan

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Anggaran



Isa Rachmatarwata

LAMPIRAN III - DEFINISI DAN RUANG LINGKUP KRO SERTA REKOMENDASI PENUANGAN RO

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
A	Kerangka Regulasi	A	Peraturan	1	AAA	PAA	Undang-Undang Satuan : UU, RUU	Nomenklatur RO menyebutkan secara spesifik dan jelas, nama dari rancangan undang-undang yang akan disusun. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Undang - Undang tentang/mengenai ... - RUU tentang/mengenai...
							<i>Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, termasuk di dalamnya rancangan undang-undang, dan tidak termasuk di dalamnya naskah akademis dalam rangka penyusunan undang-undang</i>	Contoh - RUU Tentang Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - RUU mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
				2	AAB	PAB	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Satuan : Perppu	Nomenklatur RO menyebutkan secara spesifik dan jelas, nama dari RO perppu yang akan disusun. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) tentang/mengenai
							<i>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, termasuk di dalamnya rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan tidak termasuk di dalamnya naskah akademis dalam rangka penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang - undang</i>	Contoh : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang/mengenai Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
				3	AAC	PAC	Peraturan Pemerintah Satuan : PP, RPP	Nomenklatur RO menyebutkan secara spesifik dan jelas, nama dari peraturan pemerintah yang akan disusun. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Peraturan Pemerintah tentang/mengenai ... - Rancangan Peraturan Pemerintah tentang/mengenai ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, termasuk di dalamnya rancangan peraturan presiden, dan tidak termasuk di dalamnya naskah akademis dalam rangka penyusunan peraturan pemerintah</i>	Contoh : - Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah - Perubahan Peraturan Pemerintah Mengenai Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
				4	AAD	PAD	Peraturan Presiden Satuan : PerPres, RaPerpres	Nomenklatur RO menyebutkan secara spesifik dan jelas, nama dari peraturan presiden yang akan disusun. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Peraturan Presiden tentang/mengenai ... - Rancangan Peraturan Presiden tentang/mengenai ...
							<i>Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, termasuk di dalamnya rancangan peraturan presiden</i>	Contoh : - Peraturan Presiden mengenai Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa - Revisi Perpres Nomor 107/2013 tentang Pelayanan Kesehatan tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
				5	AAE	PAE	Keputusan Presiden Satuan : KepPres	Nomenklatur RO menyebutkan secara spesifik dan jelas, nama dari RO keputusan presiden yang akan disusun. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Keputusan Presiden tentang/mengenai ...
							<i>Keputusan Presiden adalah Keputusan yang bersifat konkret, individual dan sekali selesai mengenai suatu hal tertentu yang ditetapkan oleh Presiden. KRO ini tidak untuk menampung RO yang bersifat output antara, aktivitas/ kegiatan, kajian atau peraturan turunan sebagai implikasi dari suatu keputusan presiden.</i>	Contoh : - Keputusan Presiden mengenai Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional - Keputusan Presiden mengenai Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
				6	AAF	PAF	Instruksi Presiden Satuan : InPres	Nomenklatur RO menyebutkan secara spesifik dan jelas, nama dari RO instruksi presiden yang akan disusun. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Instruksi Presiden tentang/mengenai ...
							<i>Instruksi Presiden merupakan Kebijakan Presiden berupa instruksi dan arahan mengenai suatu hal tertentu berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. KRO ini tidak bertujuan untuk menampung RO yang bersifat output antara, aktivitas/kegiatan, kajian atau peraturan turunan sebagai implikasi dari suatu instruksi presiden.</i>	Contoh : Instruksi Presiden tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				7	AAG	PAG	Peraturan Menteri dan Kepala Lembaga Satuan : PerMen, PerKa	Nomenklatur RO menyebutkan secara spesifik dan jelas, nama dari peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga yang akan disusun. Nomenklatur RO juga mencantumkan nama Kementerian/Lembaga. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Peraturan Menteri tentang/mengenai ... - Peraturan Kepala tentang/mengenai ...
							<i>Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala Lembaga adalah Peraturan yang ditetapkan oleh menteri/kepala badan/kepala lembaga berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan</i>	Contoh : - Peraturan menteri mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 - Peraturan menteri di bidang politik hukum
				8	AAH	PAH	Peraturan lainnya Satuan : Peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	Nomenklatur RO menyebutkan secara spesifik nama dari peraturan yang akan disusun. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Peraturan ... - Keputusan ...
							<i>Peraturan lainnya adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Madya Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, serta keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.</i>	Contoh : - Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang SOTK - Peraturan Dirjen Anggaran mengenai Pengajuan dan Penilaian Angka kredit JFAA - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional
		B	Kebijakan	9	ABA	PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan bidang ekonomi dan keuangan yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
			<i>Kebijakan adalah serangkaian tindakan pemerintah mengenai suatu hal tertentu yang dihasilkan guna mencapai tujuan tertentu, umumnya untuk mengatur perilaku masyarakat dan/atau menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan juga mencakup kajian yang dihasilkan melalui proses identifikasi, pengujian dan penelaahan secara ilmiah yang dilakukan oleh pemerintah guna mendukung penyusunan kebijakan. Kebijakan juga dapat berupa rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi perkembangan dan permasalahan di bidang tertentu. Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup seluruh rekomendasi kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah konsepsi dan naskah urgensi dari suatu peraturan</i>				<i>Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan merujuk pada seluruh kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu di bidang Ekonomi dan Keuangan, termasuk Perbankan dan Keuangan Negara. Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Ekonomi dan Keuangan</i>	Contoh : - Kebijakan Pengembangan Sektor Ekonomi Potensial yang Berdaya Saing Tinggi dengan Mengoptimalkan Teknologi Informasi Digital - Rekomendasi Kebijakan APBN - Rekomendasi Kebijakan terhadap RUU tentang Perbankan Syariah
				10	ABB	PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan investasi dan perdagangan yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...
							<i>Kebijakan Bidang Investasi merujuk pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait ppenanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.</i> <i>Kebijakan Bidang Perdagangan merujuk pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait tatanan kegiatan transaksi atau perdagangan atas barang dan/atau Jasa baik di dalam maupun luar negeri</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Investasi dan Perdagangan</i>	Contoh: - Kebijakan Optimalisasi Penerapan Sistem National Single Window (NSW) - Kebijakan Investasi Terbuka (<i>Open Investment Policy</i>) - Rekomendasi Kebijakan terhadap Perubahan UU tentang Penanaman Modal

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				11	ABC	PBC	Kebijakan Bidang Politik Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan bidang politik yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...
							<i>Kebijakan Bidang Politik merujuk pada Kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum (public policy), termasuk namun tidak terbatas pada proses pemilihan umum, lembaga pemilihan umum, partai politik, dsb.</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Politik</i>	Contoh: - Kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik - Rekomendasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah - Rekomendasi Kebijakan terhadap Revisi UU tentang Pilkada
				12	ABD	PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan bidang hukum dan HAM yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Kebijakan Bidang Hukum mencakup kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum internasional, termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan terkait peraturan perundang-undangan; keimigrasian; pidana dan pemyarakatan; pembentukan badan hukum; penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana; peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara dan konstitusi.</i> <i>Kebijakan Bidang Hak Asasi Manusia mencakup kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait dengan upaya penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan promosi atas seluruh jenis hak asasi manusia baik yang diakui dalam Declaration of Human Rights, konvensi internasional yang telah diratifikasi serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Hukum dan HAM</i>	Contoh : - Rekomendasi Kebijakan Bidang Penegakan Hak Asasi Manusia - Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Korban Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat secara Non Yudisial - Rekomendasi Kebijakan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata
				13	ABE	PBE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan pertahanan dan keamanan yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Kebijakan Bidang Pertahanan merujuk pada Kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu yang berkaitan dengan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.</i> <i>Kebijakan Bidang Keamanan merujuk pada Kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait penyelenggaraan keamanan di masyarakat.</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Pertahanan dan Keamanan</i>	Contoh : - Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Dini Terhadap Ancaman Keamanan Siber - Kebijakan Bidang Penanganan Konflik dan Keamanan Sipil - Rekomendasi Kebijakan terhadap Perubahan PP tentang Pengelolaan Industri Pertahanan
				14	ABF	PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan bidang sarana dan prasarana yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...
							<i>Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana merujuk pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur, khususnya yang bersifat prioritas jangka panjang dan/atau strategis</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Sarana dan Prasarana atau Infrastruktur</i>	Contoh: - Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis - Kebijakan Nasional pengelolaan SDA - Rekomendasi Kebijakan terhadap RPerpres tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				15	ABG	PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan bidang kesehatan yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...
							<i>Kebijakan Bidang Kesehatan merujuk pada Kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait kesehatan masyarakat dan/atau pelayanan kesehatan kepada publik baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial, termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit, penyelenggaraan layanan kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, serta peredaran obat dan alat kesehatan</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Kesehatan</i>	Contoh : - Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Gizi Ibu Hamil Masa Pandemi - Kebijakan Bidang Pelayanan Kesehatan - Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dalam Pelaksanaan Strategi Percepatan Pencegahan Stunting - Rekomendasi Kebijakan terhadap Perubahan UU tentang Wabah
				16	ABH	PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan bidang IPTEK, pendidikan dan kebudayaan yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Kebijakan mengenai IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan meliputi namun tidak terbatas pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu mengenai penyelenggaraan, pemajuan, kelembagaan, sumber daya, jaringan, pembinaan, dan pengawasan ilmu pengetahuan dan teknologi; penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal, serta pengembangan dan pelestarian kebudayaan, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik.</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan</i>	Contoh : - Kebijakan Riset dan Inovasi Dalam Pengembangan Iptek - Rekomendasi Kebijakan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah - Rekomendasi Kebijakan terhadap RPP tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
				17	ABI	PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan bidang energi dan sumber daya alam yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Kebijakan Bidang Energi merujuk Kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait pemenuhan dan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional; prioritas pengembangan energi; pemanfaatan sumber daya energi nasional; dan cadangan penyangga energi nasional.</i> <i>Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam merujuk pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa), serta kebijakan mengenai kegiatan yang meliputi namun tidak terbatas pada perlindungan sistem penyangga kehidupan; pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Energi dan Sumber Daya Alam</i>	Contoh: - Rekomendasi Kebijakan terkait Biomedika Nuklir, Radioekologi, Keselamatan dan Metrologi Radiasi - Rekomendasi Kebijakan Kegiatan Hilirisasi Sumber Daya Maritim - Rekomendasi Kebijakan terhadap RPP tentang Keselamatan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
				18	ABJ	PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan bidang lingkungan hidup yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup merujuk pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, termasuk namun tidak terbatas pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Lingkungan Hidup</i>	Contoh: - Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 - Rekomendasi Kebijakan terkait Pengelolaan Bahan Bahaya dan Beracun - Rekomendasi Kebijakan terhadap RPP tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
				19	ABK	PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan bidang tenaga kerja, industri dan umkm yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Kebijakan Bidang Tenaga Kerja meliputi namun tidak terbatas pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait penjaminan hak tenaga kerja dan pemberi kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja; perlindungan terhadap tenaga kerja dan pemberi kerja; hubungan ketenagakerjaan antara tenaga kerja dan pemberi kerja</i> <i>Kebijakan Bidang Industri merujuk pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri</i> <i>Kebijakan Bidang UMKM merujuk pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait penyelenggaraan usaha oleh pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM</i>	Contoh : - Kebijakan Penyertaan Modal Negara untuk Pemulihan UMKM - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor - Rekomendasi Kebijakan terhadap RPerpres tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
				20	ABL	PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan bidang tata kelola pemerintahan yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...
							<i>Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan merujuk pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait tata kelola pemerintahan yang baik.</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Tata Kelola Pemerintahan</i>	Contoh : - Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan - Kebijakan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah - Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan - Rekomendasi Kebijakan terhadap RPerpres tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				21	ABM	PBM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan bidang pelayanan publik. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...
							<i>Kebijakan Bidang Pelayanan Publik merujuk pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik.</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Pelayanan Publik</i>	Contoh: - Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik - Rekomendasi Kebijakan lingkup Administrasi Kependudukan - Rekomendasi Kebijakan terhadap RPerpres tentang Bebas Visa Kunjungan
				22	ABN	PBN	Kebijakan Bidang Sosial Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan bidang sosial yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...
							<i>Kebijakan Bidang Sosial merujuk pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik.</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Sosial</i>	Contoh : - Rekomendasi Kebijakan Penanganan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan orang - Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak - Rekomendasi Kebijakan terhadap RPP tentang Konsesi dan Insentif Bagi Penyandang Disabilitas

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				23	ABO	PBO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan bidang teknologi informasi yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...
							<i>Kebijakan Bidang Teknologi Informasi merujuk pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait pengumpulan, penyiapan, penyimpanan, pengolahan, penyampaian dan penyebaran suatu informasi, termasuk di dalamnya pemanfaatan teknologi dalam proses tersebut, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik.</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Teknologi Informasi</i>	Contoh : - Kebijakan Bidang Telekomunikasi dalam Mendukung Ekonomi Digital - Rekomendasi Kebijakan Peta Rencana Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) - Kebijakan tentang Revisi UU ITE
				24	ABP	PBP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan pengembangan wilayah yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah merupakan kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu yang berkaitan dengan proses untuk mengarahkan segala potensi wilayah yang bersangkutan untuk didayagunakan secara terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk didalamnya kebijakan kewilayahan dalam rangka meningkatkan integrasi dan konektivitas antar kawasan, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik.</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Pengembangan Wilayah</i>	Contoh: - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Desa Digital melalui Smart Village - Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial - Rekomendasi Kebijakan terhadap RPP tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029
				25	ABQ	PBQ	Kebijakan Bidang Aparatur Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan bidang aparatur yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...
							<i>Kebijakan Bidang Aparatur merujuk pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait profesi aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik.</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Aparatur</i>	Contoh : - Rekomendasi Kebijakan Tunjangan, Fasilitas dan Evaluasi Jabatan ASN - Rekomendasi Kebijakan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Jabatan ASN - Rekomendasi Kebijakan terhadap RPP tentang Tunjangan Kinerja PNS Instansi Daerah

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				26	ABR	PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan bidang pertanian dan perikanan yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...
							<i>Kebijakan Bidang Pertanian merujuk pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait pengelolaan sumber daya serta komoditas pangan dan pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem, mulai dari proses praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran</i> <i>Kebijakan Bidang Perikanan merujuk pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Pertanian dan Perikanan</i>	Contoh : - Rekomendasi Kebijakan Teknologi Pertanian - Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Sumber Daya Kelautan di seluruh Wilayah Indonesia - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor - Rekomendasi Kebijakan terhadap Revisi UU tentang Perikanan
				27	ABS	PBS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan bidang ketahanan bencana dan perubahan iklim yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana merujuk pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait ketahanan bencana (pencegahan dan penanggulangan bencana serta pemulihan pasca bencana).</i> <i>Kebijakan Bidang Perubahan Iklim merujuk pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait perubahan kondisi fisik atmosfer bumi, seperti kebijakan terkait perubahan suhu bumi dan distribusi curah hujan</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</i>	Contoh : - Kebijakan Bidang Ketahanan Kebencanaan untuk Pengembangan Wilayah - Rekomendasi Kebijakan Sistem Mitigasi Bencana Geologi - Rekomendasi Kebijakan terhadap RUU Tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim
				28	ABT	PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan bidang ruang dan pertanahan yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...
							<i>Kebijakan Bidang Ruang meliputi namun tidak terbatas pada kebijakan, rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait penyiapan, pemanfaatan, pengelolaan dan perlindungan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah negara.</i> <i>Kebijakan Bidang Pertanahan adalah kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu yang berhubungan dengan kepemilikan dan pengelolaan tanah</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Ruang dan Pertanahan</i>	Contoh: - Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan - Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) - Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Agraria - Rekomendasi Kebijakan terhadap RPerpres tentang Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				29	ABU	PBU	Kebijakan Bidang Tenaga Nuklir Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan bidang tenaga nuklir yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...
							<i>Kebijakan Bidang Tenaga Nuklir merujuk pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait kebutuhan energi tenaga nuklir; pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Nuklir</i>	Contoh : - Rekomendasi Kebijakan terkait Hasil Aplikasi Isotop dan Radiasi - Kebijakan terkait Biomedika Nuklir, Radioekologi, Keselamatan dan Metrologi Radiasi - Rekomendasi Kebijakan terhadap RPP tentang Instalasi Nuklir
				30	ABV	PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan bidang kehutanan yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...
							<i>Kebijakan Bidang Kehutanan merujuk pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Kehutanan</i>	Contoh : - Rekomendasi Kebijakan Strategi dan Informasi Kinerja Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat - Kebijakan Kemitraan Lingkungan - Rekomendasi Pengembangan Usaha Restorasi Ekosistem, Pemanfaatan Kawasan, HHBK & Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi - Rekomendasi Kebijakan terhadap RPerpes tentang Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati/IBSAP

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				31	ABW	PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan Satuan : Rekomendasi Kebijakan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan perihal/tema khusus atas kebijakan bidang kemaritiman dan kelautan yang dihasilkan. Dalam hal kebijakan tersebut berbentuk naskah akademis/naskah urgensi/naskah konsep, Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis dan judul/tema/perihal peraturan yang akan disusun berdasarkan kebijakan tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rekomendasi Kebijakan ... - Kebijakan ...
							<i>Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan merujuk pada kebijakan, termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan laut, perairan laut, perairan teritorial, aktivitas pelayaran, serta perdagangan dan ekonomi maritim, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik</i> <i>Kebijakan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan dalam bentuk naskah akademis, naskah urgensi, naskah konsepsi atas suatu peraturan di bidang Kemaritiman dan Kelautan</i>	Contoh : - Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim - Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi - Kebijakan Perencanaan Lingkup Kelautan dan Perikanan -Rekomendasi Kebijakan tentang RPerpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cendrawasih
		C	Perizinan	32	ACA	PCA	Perizinan Produk Satuan : Produk	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis produk (barang ataupun jasa) dan jenis/klasifikasi/nama izin yang diberikan terhadap produk tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Izin - Surat Izin ... - Perizinan ...
			<i>Perizinan adalah hal yang berkaitan dengan pemberian izin. Izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); persetujuan membolehkan.</i>				<i>Perizinan terhadap produk baik berupa barang ataupun jasa yang beredar di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.</i>	Contoh: - Izin penangkapan/pengangkutan ikan (SIPI/SIKPI) sesuai SIUP - Surat Izin Pupuk Dan Pestisida - Perizinan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
				33	ACB	PCB	Perizinan Masyarakat Satuan : Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/klasifikasi/nama izin yang diberikan kepada individu atau perseorangan Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Izin - Surat Izin ... - Perizinan ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Perizinan yang diberikan terhadap individu atau perseorangan di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.</i>	Contoh : - Perizinan Tenaga Kerja Asing - Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) bagi WNA - Izin Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir
				34	ACC	PCC	Perizinan Kelompok Masyarakat Satuan : Kelompok Masyarakat	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/klasifikasi/nama izin yang diberikan kepada kelompok masyarakat Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Izin - Surat Izin ... - Perizinan ...
							<i>Perizinan yang diberikan terhadap kelompok masyarakat, termasuk didalamnya komunitas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.</i>	Contoh : - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas - Perijinan Akses Kelola Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, KK, IPHPS - Izin Penelitian di Daerah
				35	ACD	PCD	Perizinan Lembaga Satuan : Institusi, Lembaga, Badan Usaha	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis lembaga dan jenis/klasifikasi/nama izin yang diberikan terhadap lembaga tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Izin - Surat Izin ... - Perizinan ...
							<i>Perizinan yang diberikan terhadap lembaga formal maupun lembaga non formal, termasuk namun tidak terbatas pada lembaga pemerintah, badan usaha, umkm, industri, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat</i>	Contoh : - Surat Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja - Perizinan Penanaman Modal - Perizinan Lembaga Penelitian dan Industri - Perizinan Lembaga penempatan PMI
				36	ACE	PCE	Perizinan Profesi Satuan : Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis profesi dan jenis/klasifikasi/nama izin yang diberikan terhadap profesi tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Izin - Surat Izin ... - Perizinan ...
							<i>Perizinan yang diberikan kepada profesi yang telah memiliki keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan secara formal.</i>	Contoh : - Surat Izin Praktik (SIP) bagi Dokter - Perizinan Penerjemah Tersumpah

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
		D	Akreditasi, Standardisasi, dan Sertifikasi	37	ADA	PDA	Standardisasi Produk Satuan : Produk	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan produk (barang/jasa) dan jenis/klasifikasi/nama layanan standardisasi yang diberikan atau dilakukan terhadap produk tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Standar ... - Standardisasi ... - Layanan Standardisasi...
			Akreditasi merujuk pada pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian. Standardisasi merujuk pada perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, pemberlakuan, pemeliharaan dan pengawasan atas standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Sertifikasi merujuk pada penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.				Standardisasi Produk merujuk pada layanan standarisasi yang dilakukan terhadap suatu produk barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar dan/atau peraturan dan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang.	Contoh : - Standar Nasional Indonesia (SNI) Industri Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Aneka - Standardisasi Mutu Hasil Perkebunan
				38	ADB	PDB	Akreditasi Produk Satuan: Produk	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan produk (barang/jasa) dan jenis/klasifikasi/nama layanan akreditasi yang diberikan atau dilakukan terhadap produk tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Akreditasi ... - Layanan Akreditasi
							Akreditasi Produk merujuk pada layanan akreditasi yang dilakukan terhadap produk barang dan/atau jasa	Contoh : - Akreditasi Program Studi di Perguruan Tinggi Negeri - Akreditasi Layanan Diseminasi SNSU
				39	ADC	PDC	Sertifikasi Produk Satuan : Produk	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan produk (barang/jasa) dan jenis/klasifikasi/nama layanan sertifikasi yang diberikan atau dilakukan terhadap produk tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Sertifikasi ... - Layanan Sertifikasi ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Sertifikasi Produk merujuk pada layanan sertifikasi yang dilakukan terhadap suatu produk barang dan/atau jasa yang beredar ke publik yang telah memenuhi standar dan/atau peraturan dan dilakukan oleh institusi yang berwenang.</i>	Contoh : - Layanan Sertifikasi Varietas Tanaman Pertanian - Sertifikasi Produk Industri Obat Tradisional - Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan
				40	ADD	PDD	Standardisasi Lembaga Satuan : Lembaga	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis lembaga dan jenis/klasifikasi/nama layanan standardisasi yang diberikan atau dilakukan terhadap lembaga tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Standardisasi ... - Layanan Standardisasi
							<i>Standarisasi Lembaga adalah layanan standarisasi yang dilakukan terhadap lembaga formal maupun non-formal dengan memenuhi standar dan/atau peraturan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang.</i>	Contoh : - Standardisasi Lembaga Layanan dan Rehabilitasi Perempuan dan Anak - Standardisasi Lembaga Rehabilitasi Narkoba berdasarkan Pelayanan Minimal (SPM)
				41	ADE	PDE	Akreditasi Lembaga Satuan : Lembaga	Nomenklatur RO secara spesifik menjelaskan jenis lembaga dan jenis/klasifikasi/nama layanan akreditasi yang diberikan atau dilakukan terhadap lembaga tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Akreditasi - Layanan Akreditasi
							<i>Akreditasi Lembaga adalah layanan dari suatu lembaga yang menyatakan bahwa sesuai kriteria tertentu suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk melaksanakan Penilaian Kesesuaian.</i>	Contoh: - Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja - Layanan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial
				42	ADF	PDF	Sertifikasi Lembaga Satuan : Lembaga, Badan Usaha	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis lembaga dan jenis/klasifikasi/nama layanan sertifikasi yang diberikan atau dilakukan terhadap lembaga tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Sertifikasi Lembaga/Badan Usaha ... - Sertifikasi ... - Layanan Sertifikasi
							<i>Sertifikasi Lembaga adalah layanan sertifikasi yang dilakukan terhadap lembaga formal maupun non-formal yang telah memenuhi standar dan/atau peraturan dan dilakukan oleh institusi yang berwenang.</i>	Contoh: - Sertifikasi Laboratorium/Lembaga Uji dan Lembaga Pelatihan Ketanagaproduktif - Layanan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				43	ADG	PDG	Standardisasi Profesi dan SDM Satuan : Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis profesi dan jenis/klasifikasi/nama layanan standardisasi yang diberikan terhadap profesi tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Standardisasi ... - Layanan Standarisi
							<i>Standardisasi Profesi dan SDM merujuk pada layanan standardisasi yang dilakukan oleh institusi yang berwenang terhadap suatu profesi atau SDM dengan batasan kemampuan minimal, berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat menjalankan aktivitas profesionalnya secara mandiri</i>	Contoh: - Standarisasi dan Implementasi Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Berbasis Sistem Merit - Layanan Standardisasi Tenaga Kesehatan - Standarisasi Profesi Humas Pemerintah
				44	ADI	PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM Satuan : Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis profesi dan jenis/klasifikasi/nama layanan sertifikasi yang diberikan terhadap profesi tersebut Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Sertifikasi ... - Layanan Sertifikasi...
							<i>Sertifikasi Profesi dan SDM merujuk pada layanan sertifikasi (termasuk rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian dan pemberian jaminan tertulis, mencakup pemeriksaan, pengendalian dan penerbitan sertifikasi) terhadap profesi atau sumber daya manusia tertentu sesuai standar dan/atau regulasi.</i>	Contoh: - Sertifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri - Layanan Sertifikasi SDM Industri kimia hilir - Sertifikasi Kompetensi Guru
		E	Koordinasi dan Kerja Sama	45	AEA	PEA	Koordinasi Satuan : Kegiatan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan nama/bidang/perihal atas layanan koordinasi yang diberikan. Nama RO tidak perlu menyebutkan nama lokasi tempat, atau unit yang melaksanakannya. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Koordinasi ...
			<i>Koordinasi dan kerja sama merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memadukan dan mengintegrasikan demi terwujudnya tujuan bersama</i>				<i>Koordinasi merujuk pada layanan koordinasi untuk mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan, mensinkronisasikan dan/atau menghubungkan orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi atau antar organisasi-organisasi sehingga tercapai tujuan secara efisien dan efektif. Layanan koordinasi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka untuk mensinkronisasikan/ mengharmonisasikan/ menyelaraskan tujuan suatu program pemerintah.</i>	Contoh: - Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 - Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan - Koordinasi Pengawasan Pengelolaan Limbah

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				46	AEB	PEB	Forum Satuan : Forum	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan nama/tema/bidang/perihal atas forum yang dilaksanakan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Forum ...
							<i>Forum merujuk pada layanan dalam membentuk suatu wadah pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas mengenai suatu isu tertentu, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik serta dapat digunakan oleh K/L penyelenggara atau peserta</i>	Contoh : - Forum Dialog Kebijakan Perdagangan Luar Negeri - Forum Multilateral Terkait Isu Lingkungan Hidup
				47	AEC	PEC	Kerja sama Satuan : Kesepakatan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan nama/bidang/tema/perihal atas layanan kerjasama yang dihasilkan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Kerja sama ...
							<i>Kerja Sama merujuk pada layanan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dalam mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan. Kerja Sama meliputi kerjasama antar Kementerian/Lembaga, serta kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Lain, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik.</i>	Contoh: - Kerja Sama Penempatan Pekerja Migran di Benua Amerika - Kerja Sama Antar Lembaga Pendidikan Tinggi - Kerja Sama Tri Dharma Perguruan Tinggi
				48	AED	PED	Perjanjian Satuan : Perjanjian	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan judul/tema bidang/perihal dari perjanjian yang dihasilkan Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Perjanjian ...
							<i>Perjanjian merujuk pada dokumen tertulis yang menunjukkan adanya suatu perikatan hukum antara satu orang dengan orang lainnya, satu lembaga dengan lembaga lainnya atau antara lembaga dengan orang perseorangan yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai perikatan hukum yang berlaku</i>	Contoh: - Perjanjian tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Bidang Kesehatan - Perjanjian Indonesia-EU CEPA - Perjanjian Perdagangan Internasional Indonesia - Uni Eropa Bidang Persaingan Usaha
				49	AEE	PEE	Kemitraan Satuan : Kesepakatan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan nama, jenis, bentuk dan/atau bidang dari kemitraan Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Kemitraan ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Kemitraan merujuk pada bentuk layanan kerja sama kemitraan yang berlandaskan sukarela, saling membutuhkan, kebersamaan dan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan sektor bisnis, masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan langsung dalam isu yang dikerjasamakan. Layanan kemitraan sebagaimana dimaksud difasilitasi antar pemangku kepentingan, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik.</i>	Contoh: - Kemitraan Industri Pengolahan Susu Dengan Peternak Dalam Rangka Peningkatan Mutu Bahan Baku Industri - Kemitraan Bidang Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh di Kawasan Asia Tenggara
				50	AEF	PEF	Sosialisasi dan Diseminasi Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan nama/bidang/tema atas perihal yang disosialisasikan Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Sosialisasi ... - Diseminasi ...
							<i>Sosialisasi dan Diseminasi merujuk pada layanan penyebarluasan informasi terkait suatu kebijakan atau arahan tertentu kepada masyarakat, lembaga maupun badan usaha dengan tujuan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menerima, dan mengaplikasikan informasi tersebut, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik.</i>	Contoh: - Sosialisasi Laporan SPT di Lingkungan Kementerian PUPR - Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial - Diseminasi Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan tentang Metode Pengujian, Tata Cara Pendaftaran, Pengawasan, Penghentian Kegiatan Perdagangan dan Penarikan Barang K3L
				51	AEG	PEG	Konferensi dan Event Satuan: Kegiatan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk keluaran berupa rangkaian agenda kegiatan untuk menampilkan/merayakan/memperingati suatu hal untuk memberikan pesan tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Konferensi ... - Event ...
							<i>Konferensi dan event merujuk pada layanan pelaksanaan agenda atau kegiatan untuk menampilkan/merayakan/memperingati/mengikuti/menghadiri suatu hal pada waktu tertentu dengan tujuan memberikan pesan tertentu.</i>	Contoh: - Event Festival Film Bulanan - Konferensi dan Event Pengawasan Tempat Fasilitas Umum (TFU)
				52	AEH	PEH	Promosi Satuan: Promosi	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan nama/jenis/bentuk/bidang/perihal atas layanan promosi serta jenis barang dan/atau jasa yang akan dipromosikan Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Promosi ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Promosi merujuk pada pengenalan atau penyebaran informasi untuk menarik minat publik terhadap suatu barang dan/atau jasa, serta kebijakan atau program tertentu dari pemerintah, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik.</i>	Contoh: - Promosi Pariwisata Badan Otorita Borobudur - Promosi Produk Hortikultura
		F	NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria)	53	AFA	PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Satuan: NSPK	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/nama/perihal/bidang atas NSPK yang disusun Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) ... - Pedoman ... - Rancangan NSPK ...
			<i>Norma adalah aturan, ketentuan, tatanan, atau kaidah yang dipakai sebagai panduan, pengendali tingkah laku (pemerintah dan masyarakat), atau sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.</i>				<i>NSPK merujuk pada pedoman dan ketentuan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria mencakup fungsi hubungan antara pemerintah pusat ke daerah, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik.</i>	Contoh: - NSPK Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis - NSPK Bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Rancangan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang - Pedoman Bersama tentang Tinjau Ulang Angka Dasar Pagu Kementerian/Lembaga
B	Kerangka Pelayanan Umum	A	Pelayanan Publik	54	BAA	QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat Satuan: Orang, Akta, Bidang, Laporan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan nama/jenis/bentuk/bidang/perihal atas layanan yang diberikan kepada publik/masyarakat Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan ...
			<i>Pelayanan Publik merujuk pada layanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik</i>				<i>Pelayanan Publik kepada Masyarakat merujuk pada layanan publik yang diberikan kepada seluruh warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung</i>	Contoh: - Layanan Penerbitan Akta Kelahiran - Layanan Keimigrasian Layanan Kesehatan BLU - Layanan Status Kewarganegaraan

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				55	BAB	QAB	Pelayanan Publik kepada Lembaga Satuan: Lembaga	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan nama/jenis/bentuk/bidang/perihal atas layanan yang diberikan kepada lembaga formal atau nonformal. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan informasi mengenai bentuk / bidang / jenis lembaga yang akan memperoleh layanan tersebut. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan ...
							<i>Pelayanan Publik kepada Lembaga merujuk pada Pelayanan Publik yang diberikan kepada lembaga-lembaga baik formal maupun non formal, termasuk di dalamnya lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, komunitas masyarakat dan lembaga-lembaga formal maupun non-formal lainnya.</i>	Contoh: - Layanan Pendaftaran Yayasan - Layanan Keprotokolan Kunjungan VVIP
				56	BAC	QAC	Pelayanan Publik kepada Badan Usaha Satuan: Badan usaha	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan nama/jenis/bentuk/bidang/perihal atas layanan yang diberikan kepada badan usaha. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan informasi mengenai bentuk / bidang / jenis badan usaha yang akan memperoleh layanan tersebut. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan ...
							<i>Pelayanan Publik kepada Badan Usaha merujuk pada Pelayanan Publik yang diberikan kepada Badan Usaha selain Koperasi, UMKM dan Industri, termasuk namun tidak terbatas pada Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas, Firma, dan Persekutuan Perdata (Maatschap)</i>	Contoh: - Layanan Pendaftaran Perseroan Terbatas - Layanan Pendaftaran Merk Dagang - Layanan Peta Dasar Pertanahan
				57	BAD	QAD	Pelayanan Publik kepada Industri Satuan: Industri	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan nama/jenis/bentuk/bidang/perihal atas layanan yang diberikan kepada industri, misalnya pelayanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, konsultasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan informasi mengenai bentuk/bidang/ jenis industri yang akan memperoleh layanan tersebut. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan ... - Jasa Pelayanan
							<i>Pelayanan Publik kepada Industri merujuk pada Pelayanan Publik yang diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perindustrian</i>	Contoh: - Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi - Layanan Inkubator Bisnis - Layanan Teknis Konsultasi B4T

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				58	BAE	QAE	Pelayanan Publik kepada UMKM Satuan: UMKM	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan nama/jenis/bentuk/bidang/perihal atas layanan yang diberikan kepada UMKM. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan informasi mengenai bidang dari UMKM yang akan memperoleh layanan tersebut. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan ...
							<i>Pelayanan Publik kepada UMKM merujuk pada Pelayanan Publik yang diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan ekonomi dalam lingkup usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun definisi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah mengacu pada Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</i>	Contoh: - Layanan Pendaftaran Surat Izin Usaha Perdagangan bagi UMKM
				59	BAF	QAF	Pelayanan Publik kepada Koperasi Satuan: Koperasi	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan nama/jenis/bentuk/bidang/perihal atas layanan yang diberikan kepada Koperasi. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan ...
							<i>Pelayanan Publik kepada Koperasi merujuk pada Pelayanan Publik yang diberikan kepada badan Koperasi, yakni badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perkoperasian</i>	Contoh: - Layanan Pendirian Koperasi Terintegrasi - Layanan Bimbingan Koperasi Penerima Dana Bergulir Dengan Pola Syariah
				60	BAG	QAG	Pelayanan Publik kepada LSM Satuan: LSM	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan nama/jenis/bentuk/bidang/perihal atas layanan yang diberikan kepada LSM. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan informasi mengenai bidang dari LSM yang akan memperoleh layanan tersebut. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan ...
							<i>Pelayanan Publik kepada LSM merujuk pada Pelayanan Publik yang diberikan kepada organisasi atau lembaga non-profit, termasuk Yayasan, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat</i>	Contoh: Layanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi LSM

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				61	BAH	QAH	Pelayanan Publik Lainnya Satuan: Layanan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan nama/jenis/bentuk/bidang/perihal atas layanan yang diberikan kepada pihak selain orang perorangan, lembaga, badan usaha, umkm, koperasi, dan LSM. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan informasi mengenai bidang dari LSM yang akan memperoleh layanan tersebut. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan ...
							<i>Pelayanan Publik Lainnya adalah Pelayanan Publik yang diberikan kepada penerima manfaat yang tidak termasuk pada kategori-kategori pelayanan publik masyarakat, keluarga, lembaga, badan usaha, industri, umkm, koperasi, dan LSM</i>	Contoh: - Layanan Edukasi Publik - Layanan Penatagunaan Tanah - Layanan Angkutan Orang
		B	Layanan Bantuan Hukum	62	BBA	QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan tentang nama/jenis/bentuk/bidang/perihal atas layanan bantuan jasa hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum Perseorangan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Bantuan Hukum ... - Layanan...
			<i>Layanan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang meliputi layanan dalam menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum dalam bidang hukum keperdataan, pidana, dan/atau tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum</i>				<i>Layanan Bantuan Hukum Perseorangan adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum Perseorangan</i>	Contoh: - Layanan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama - Layanan Konsultasi dan Pendampingan Hukum - Layanan Perkara Peradilan Umum bebas Biaya Perkara
				63	BBB	QBB	Layanan Bantuan Hukum Lembaga Satuan : Institusi, Lembaga	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan tentang nama/jenis/bentuk/bidang/perihal atas layanan bantuan hukum yang diberikan kepada lembaga Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Bantuan Hukum ... - Layanan...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Layanan Bantuan Hukum Lembaga adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada lembaga-lembaga baik formal maupun non formal, termasuk di dalamnya lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga-lembaga formal maupun non-formal lainnya.</i>	Contoh: - Layanan Bantuan Hukum bagi LSM di lingkungan Peradilan Umum - Layanan Penanganan Pengaduan Tertulis dan Langsung Bantuan Hukum Lembaga
				64	BBC	QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat Satuan: Kelompok Masyarakat	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan tentang nama/jenis/bentuk/bidang/perihal atas layanan bantuan hukum yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat atau komunitas. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Bantuan Hukum ... - Layanan...
							<i>Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat, termasuk komunitas</i>	Contoh: - Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat pada Sengketa Pengadaan Tanah - Layanan Advokasi Aset Wakaf
				65	BBD	QBD	Layanan Bantuan Hukum Badan Usaha Satuan: Badan Usaha	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan tentang nama/jenis/bentuk/bidang/perihal atas layanan bantuan hukum yang diberikan kepada Badan Usaha. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Bantuan Hukum ... - Layanan...
							<i>Layanan Bantuan Hukum Badan Usaha adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum Badan Usaha, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Industri dan UMKM.</i>	Contoh: - Layanan Bantuan Hukum bagi Badan Usaha pada Sengketa Wanprestasi - Layanan Bantuan Hukum pada Sengketa Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
		C	Penanganan Perkara Hukum	66	BCA	QCA	Perkara Hukum Perseorangan Satuan : Perkara	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan layanan penanganan perkara hukum yang diberikan kepada perorangan (militer maupun sipil). Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Penanganan Perkara ... - Layanan...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
			<i>Penanganan Perkara Hukum adalah upaya penyelesaian masalah-masalah hukum dalam bidang hukum keperdataan, pidana, dan/atau tata usaha yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi</i>				<i>Perkara Hukum Perseorangan adalah upaya penyelesaian masalah-masalah hukum di lingkungan orang perseorangan dalam bidang hukum keperdataan, pidana, dan/atau tata usaha yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi</i>	Contoh: - Layanan Penanganan Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer - Layanan Penanganan Perkara Perdata pada Kejaksaan Agung - Layanan Penanganan Perkara Perkara Tindak Pidana HAM Berat - Layanan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
				67	BCB	QCB	Perkara Hukum Lembaga Satuan: Perkara	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan layanan penanganan perkara hukum yang diberikan kepada lembaga. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Penanganan Perkara ... - Layanan...
							<i>Perkara Hukum Lembaga adalah upaya penyelesaian masalah-masalah hukum di lingkungan Kelembagaan baik formal maupun non formal, termasuk lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga-lembaga formal maupun non-formal lainnya dalam bidang hukum keperdataan, pidana, dan/atau tata usaha yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi</i>	Contoh: - Layanan Penanganan Perkara pada Sengketa Partai Politik - Layanan Penanganan Perkara Tata Usaha Negara
				68	BCC	QCC	Perkara Hukum Kelompok Masyarakat Satuan: Perkara	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan layanan penanganan perkara hukum yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Penanganan Perkara ... - Layanan...
							<i>Perkara Hukum Kelompok Masyarakat adalah upaya penyelesaian masalah-masalah hukum di lingkungan Kelompok Masyarakat dalam bidang hukum keperdataan, pidana, dan/atau tata usaha yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi</i>	Contoh: - Layanan Penanganan Perkara Hukum Antar Organisasi Masyarakat - Layanan Penanganan Perkara Pelanggaran HAM
				69	BCD	QCD	Perkara Hukum Badan Usaha Satuan: Perkara	Nomenklatur RO yang secara spesifik menyebutkan layanan penanganan perkara hukum yang diberikan kepada Badan Usaha Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Penanganan Perkara... - Layanan...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Perkara Hukum Badan Usaha adalah upaya penyelesaian masalah-masalah hukum di lingkungan Badan Usaha, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, UMKM, Industri dan Koperasi dalam bidang hukum keperdataan, pidana, dan/atau tata usaha yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi</i>	Contoh: - Layanan Penanganan Perkara Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai - Layanan Penanganan Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan
				70	BCE	QCE	Penanganan Perkara Satuan: Perkara	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/perihal atas layanan penanganan perkara atau penyelesaian masalah hukum yang diberikan kepada suatu subjek hukum yang tidak dapat dibedakan antara Perseorangan, Lembaga, Badan Usaha, Kelompok Masyarakat. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Penanganan Perkara ... - Layanan...
							<i>Penanganan Perkara adalah upaya penyelesaian masalah-masalah hukum dalam bidang hukum keperdataan, pidana, dan/atau tata usaha yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi yang diberikan kepada subjek hukum secara keseluruhan (tidak ada pembedaan antara perseorangan, badan usaha dan lembaga)</i>	Contoh: - Layanan Penanganan Perkara Pertanahan - Layanan Eksekusi Pidana Badan yang Berkekuatan Hukum Tetap
		D	Fasilitasi dan Pembinaan Publik	71	BDA	QDA	Fasilitasi dan Pembinaan BUMN Satuan: BUMN	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal fasilitasi dan pembinaan kepada BUMN yang dilakukan oleh orang/unit/institusi yang berkompeten. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Fasilitasi dan Pembinaan ... - Pembinaan/Pendampingan ... - Layanan Pembinaan/Pendampingan ...
			<i>Fasilitasi dan Pembinaan Publik merujuk pada layanan yang diberikan guna meningkatkan pemahaman, memberikan pendampingan, pembinaan serta konsultasi</i>				<i>Fasilitasi dan Pembinaan BUMN merujuk pada fasilitasi dan pembinaan yang diberikan kepada suatu BUMN</i>	Contoh: - Pembinaan BUMN Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan Kelompok I - Fasilitasi Pengembangan BUMN sektor Industri Mineral dan Batubara
				72	BDB	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Satuan: Lembaga	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal fasilitasi dan pembinaan yang diberikan kepada lembaga, yang dilakukan oleh orang/unit/institusi yang berkompeten. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Fasilitasi dan Pembinaan ... - Pembinaan/Pendampingan ... - Layanan Pembinaan/Pendampingan ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga merujuk pada fasilitasi dan pembinaan yang diberikan kepada lembaga-lembaga baik formal maupun non formal, termasuk di dalamnya lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, komunitas masyarakat dan lembaga-lembaga formal maupun non-formal lainnya.</i>	Contoh: - Pembinaan Manajemen Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha - Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi - Fasilitasi dan Pembinaan Substansi Perancangan Perda
				73	BDC	QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan tentang jenis/bentuk/bidang/perihal fasilitasi dan pembinaan yang diberikan kepada orang atau kelompok masyarakat tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Fasilitasi dan Pembinaan ... - Pembinaan/Pendampingan ... - Layanan Pembinaan/Pendampingan ...
							<i>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat merujuk pada fasilitasi dan pembinaan yang diberikan kepada entitas individu atau perseorangan</i>	Contoh: - Layanan Pendampingan Pembibitan di Masyarakat - Pembinaan Kewirausahaan Masyarakat
				74	BDD	QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Satuan: Kelompok Masyarakat	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal fasilitasi dan pembinaan kepada kelompok/masyarakat, yang dilakukan oleh orang/ unit/ institusi yang berkompeten, misalnya pembinaan dan pendampingan terhadap suatu kebijakan pemerintah. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Fasilitasi dan Pembinaan ... - Pembinaan/Pendampingan ... - Layanan Pembinaan/Pendampingan ...
							<i>Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat merujuk pada fasilitasi dan pembinaan yang diberikan kepada suatu kelompok masyarakat</i>	Contoh: - Layanan Pembinaan Keolahragaan bagi Kelompok Masyarakat - Fasilitasi dan pembinaan Sentra IKM dan UPT Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka - Pembinaan dan Penggalangan Masyarakat di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja
				75	BDE	QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga Satuan: Keluarga	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal fasilitasi dan pembinaan kepada keluarga yang dilakukan oleh orang/unit/institusi yang berkompeten. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Fasilitasi dan Pembinaan ... - Pembinaan/Pendampingan ... - Layanan Pembinaan/Pendampingan ...
							<i>Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga merujuk pada fasilitasi dan pembinaan yang diberikan kepada suatu keluarga atau keluarga - keluarga</i>	Contoh: - Layanan Pembinaan terkait Ekonomi Keluarga - Layanan Pembinaan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba - Pendampingan Kegiatan Penanganan Akses

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				76	BDF	QDF	Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Satuan: Koperasi	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal fasilitas dan pembinaan yang diberikan pemerintah kepada koperasi. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Fasilitasi dan Pembinaan ... - Pembinaan/Pendampingan ... - Layanan Pembinaan/Pendampingan ...
							<i>Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi merujuk pada fasilitasi dan pembinaan yang diberikan kepada badan Koperasi, yakni badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perkoperasian</i>	Contoh: - Fasilitasi Asuransi untuk Koperasi - Layanan Pendampingan Pembentukan Koperasi bagi Kelompok Pra Koperasi
				77	BDG	QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Satuan: UMKM	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal fasilitas dan pembinaan yang diberikan kepada pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dilakukan oleh orang/unit/institusi yang berkompeten. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Fasilitasi dan Pembinaan ... - Pembinaan/Pendampingan ... - Layanan Pembinaan/Pendampingan ...
							<i>Fasilitasi dan Pembinaan UMKM merujuk pada fasilitasi dan pembinaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan ekonomi dalam lingkup usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun definisi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah mengacu pada Undang-Undang Nomor tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</i>	Contoh: - Layanan Pembinaan mengenai Skema Bisnis <i>Start-Up</i> bagi UMKM - Fasilitasi Pameran dan Promosi KUMKM di Daerah - Fasilitasi Kemitraan dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)
				78	BDH	QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha Satuan: Badan usaha	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal fasilitasi dan pembinaan kepada badan usaha selain BUMN, Koperasi, UMKM dan Industri, yang dilakukan oleh orang/unit/institusi yang berkompeten. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Fasilitasi dan Pembinaan ... - Pembinaan/Pendampingan ... - Layanan Pembinaan/Pendampingan ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha merujuk pada fasilitasi dan pembinaan yang diberikan kepada suatu badan usaha selain BUMN, Koperasi, UMKM dan Industri, termasuk namun tidak terbatas pada Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas, Firma, dan Persekutuan Perdata (Maatschap)</i>	Contoh: - Layanan Fasilitasi terkait Pengembangan Pangan Fungsional untuk Perusahaan - Layanan Fasilitasi terkait Ekspor Produk Industri Berbasis Agro - Layanan Pendampingan Investasi Perusahaan Multinasional
				79	BDI	QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri Satuan: Industri	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal fasilitasi dan pembinaan kepada pelaku industri, yang dilakukan oleh orang/unit/institusi yang berkompeten. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Fasilitasi dan Pembinaan ... - Pembinaan/Pendampingan ... - Layanan Pembinaan/Pendampingan ...
							<i>Fasilitasi dan Pembinaan Industri merujuk fasilitasi dan pembinaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Perindustrian</i>	Contoh: - Layanan Fasilitasi Industri Kimia Hulu Nasional - Fasilitasi dan Pendampingan Teknis Sektor Industri Melalui Insentif Non Fiskal - Pendampingan Industri dalam Akses Industri Internasional - Fasilitasi, Pembinaan dan Pendampingan atas Sertifikasi IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka
				80	BDJ	QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up Satuan: Start Up	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal fasilitasi dan pembinaan kepada Start Up, yang dilakukan oleh orang/unit/institusi yang berkompeten. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Fasilitasi dan Pembinaan ... - Pembinaan/Pendampingan ... - Layanan Pembinaan/Pendampingan ...
							<i>Fasilitasi dan Pembinaan Start Up merujuk pada fasilitasi pembinaan dan pendampingan serta konsultasi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan ekonomi rintisan dalam lingkup usaha Mikro, Kecil, dan yang baru saja atau beroperasi atau sudah lama beroperasi terutama yang erat dengan dunia teknologi/platform digital, dan memiliki sifat disruptive dan/atau menciptakan industri baru.</i>	Contoh: - Fasilitasi Kemitraan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan <i>e-Fishery</i> - Pendampingan Teknis <i>Start Up</i> Melalui Pemberian Insentif Non Fiskal - Layanan Pembinaan <i>Start-Up</i> Inovasi Masyarakat

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
		E	Bantuan	81	BEA	QEA	Bantuan Masyarakat Satuan: Orang	Nomenklatur RO menyebutkan secara spesifik jenis/bentuk/bidang/perihal bantuan yang diberikan kepada perseorangan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Bantuan ...
			<i>Bantuan merupakan uang, barang atau Jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada penerima manfaat</i>				<i>Bantuan Masyarakat meliputi bantuan berupa uang tunai, barang dan jasa layanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada entitas individu perseorangan</i>	Contoh: - Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional - Bantuan Sosial
				82	BEB	QEB	Bantuan Keluarga Satuan: Keluarga	Nomenklatur RO menyebutkan secara spesifik jenis/bentuk/bidang/perihal bantuan yang diberikan kepada keluarga. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Bantuan ...
							<i>Bantuan Keluarga meliputi bantuan uang tunai, barang dan jasa layanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada keluarga atau kelompok keluarga tertentu</i>	Contoh: - Bantuan Tunai Bersyarat Keluarga Miskin - Bantuan Usaha Ekonomi Produktif untuk KPM
				83	BEE	QEE	Bantuan Penanggulangan Bencana Satuan: Paket	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk /jenis/perihal bantuan kebencanaan yang diberikan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Bantuan ...
							<i>Bantuan Penanggulangan Bencana merupakan uang, barang dan jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan kesiapsiagaan peringatan dini, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi atas terjadinya suatu bencana. Bantuan tersebut meliputi bantuan penyediaan dana siap pakai dalam rangka kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana berupa kebutuhan air bersih, sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial serta penampungan dan tempat hunian.</i>	Contoh: - Bantuan Darurat bencana alam Banjir - Bantuan Dana Siap Pakai Darurat Kebencanaan - Bantuan Perumahan Tanggap Darurat Bencana
				84	BEH	QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat Satuan: Kelompok Masyarakat	Nomenklatur RO menyebutkan secara spesifik jenis/bentuk/bidang/perihal bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Bantuan ... - Bantuan sarana/peralatan ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Bantuan Kelompok Masyarakat meliputi bantuan uang tunai, barang dan jasa layanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada kelompok masyarakat</i>	Contoh: - Bantuan Sarana Air Minum dan Sanitasi kepada Masyarakat di sekitar Sungai Citarum
				85	BEI	QEI	Bantuan Lembaga Satuan: Lembaga	Nomenklatur RO menyebutkan secara spesifik jenis/bentuk/bidang/perihal bantuan yang diberikan kepada lembaga tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Bantuan ...
							<i>Bantuan Lembaga meliputi bantuan uang tunai, barang dan jasa layanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada lembaga formal maupun lembaga non formal, termasuk namun tidak terbatas pada lembaga pemerintah, badan usaha, umkm, pelaku usaha, industri, koperasi, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat</i>	Contoh: - Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan - Bantuan Pengembangan Perfilman Lembaga Formal/Informal - Bantuan Pemerintah Untuk lembaga/Organisasi Penyelenggara Pendidikan
				86	BEN	QEN	Bantuan Peserta Didik Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis bantuan peserta didik yang diberikan pemerintah. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Bantuan Pendidikan... - Beasiswa.. - Bantuan...
							<i>Bantuan Peserta Didik meliputi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa dan/atau bantuan operasional tertentu yang diberikan kepada peserta didik baik tingkat dasar, menengah maupun pendidikan tinggi</i>	Contoh: - Beasiswa S2/S3 bidang kominfo - Beasiswa PPA Mahasiswa Berprestasi - Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan
				87	BEO	QEO	Bantuan Produk dan Peralatan Satuan: Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk atau jenis bantuan berupa barang dari pemerintah kepada masyarakat, keluarga, dan atau lembaga. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Bantuan ...
							<i>Bantuan Produk dan Peralatan meliputi bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam bentuk barang habis pakai maupun barang tidak habis pakai (peralatan / sarana) termasuk namun tidak terbatas pada bentuk tanaman, hewan, peralatan dan sebagainya.</i>	Contoh: - Bantuan Kebutuhan Pokok - Bantuan Sembako
		F	Subsidi	88	BFA	QFA	Subsidi kepada Masyarakat Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/perihal/bidang atas subsidi yang diberikan Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Subsidi...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
			<i>Subsidi merujuk pada alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga Pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan/atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.</i>				<i>Subsidi yang diberikan kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya dengan tujuan akhir supaya harga jual barang/jasa tersebut dapat dijangkau oleh Masyarakat</i>	Contoh: - Subsidi LPG 3 KG - Subsidi BBM
				89	BFB	QFB	Subsidi kepada Lembaga Satuan: Lembaga	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/perihal/bidang atas subsidi yang diberikan Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Subsidi...
							<i>Subsidi yang diberikan kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan/atau jasa sehingga harga jual barang/jasa tersebut dapat dijangkau oleh lembaga formal maupun lembaga non formal, termasuk namun tidak terbatas pada lembaga pemerintah, badan usaha, umkm, industri, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat</i>	Contoh: Subsidi Bahan Bakar Avtur
				90	BFC	QFC	Subsidi kepada Keluarga Satuan: Keluarga	Nomenklatur RO yang secara spesifik menyebutkan bentuk/ jenis/perihal/bidang atas subsidi yang diberikan Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Subsidi...
							<i>Subsidi yang diberikan kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan/atau jasa sehingga harga jual barang/jasa tersebut dapat dijangkau oleh Keluarga</i>	Contoh: Subsidi Bantuan Pembiayaan Perumahan berbasis Tabungan
		G	Tata Kelola Kelembagaan Publik	91	BGA	QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi Satuan: Lembaga	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis tata kelola kelembagaan yang dihasilkan. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan perihal/lingkup dari tata kelola kelembagaan publik bidang ekonomi yang dimaksud. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Tata Kelola ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
			<i>Tata Kelola Kelembagaan Publik merujuk pada kaidah, aturan, susunan; atau sistem dalam mengendalikan dan menyelenggarakan kelembagaan publik, baik yang diselenggarakan oleh lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif maupun badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.</i>				<i>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi merupakan Tata Kelola Kelembagaan Publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan bidang ekonomi, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik.</i>	Contoh: - Tata Kelola dan Operasional Pelabuhan Perikanan sesuai Standar - Tata Kelola Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Model Bisnis Kelembagaan <i>Resilience</i> dan <i>Sustainable</i>
				92	BGB	QGB	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Sosial dan Budaya Satuan: Lembaga	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis tata kelola kelembagaan yang dihasilkan. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan perihal/lingkup dari tata kelola kelembagaan publik bidang sosial dan budaya yang dimaksud. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Tata Kelola ...
							<i>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Sosial dan Budaya merupakan Tata Kelola Kelembagaan Publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan bidang sosial dan budaya, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik.</i>	Contoh: - Tata Kelola Lembaga Pelatihan Kerja - Tata Kelola Lembaga Rehabilitasi Narkoba
				93	BGC	QGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan Satuan: Lembaga	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis tata kelola kelembagaan yang dihasilkan. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan perihal/lingkup dari tata kelola kelembagaan publik bidang pendidikan yang dimaksud. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Tata Kelola ...
							<i>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan merupakan Tata Kelola Kelembagaan Publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan bidang pendidikan, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik.</i>	Contoh: - Tata Kelola Lembaga Pendidikan Agama - Tata Kelola Lembaga Pendidikan Poltekkes

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				94	BGD	QGD	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan Satuan: Lembaga	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis tata kelola kelembagaan yang dihasilkan. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan perihal/lingkup dari tata kelola kelembagaan publik bidang kesehatan yang dimaksud. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Tata Kelola ...
							<i>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan merupakan Tata Kelola Kelembagaan Publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan bidang kesehatan, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik.</i>	Contoh: - Tata Kelola Rumah Sakit - Tata Kelola Puskesmas
				95	BGE	QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum Satuan: Lembaga	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis tata kelola kelembagaan yang dihasilkan. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan perihal/lingkup dari tata kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum yang dimaksud. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Tata Kelola ...
							<i>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum merupakan Tata Kelola Kelembagaan Publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan bidang politik dan hukum</i>	Contoh: - Tata Kelola Satker KPU Tingkat Provinsi - Tata Kelola Satker KPU Tingkat Kabupaten/Kota
				96	BGF	QGF	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pertahanan dan Keamanan Satuan: Lembaga	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis tata kelola kelembagaan yang dihasilkan. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan perihal/lingkup dari tata kelola kelembagaan publik bidang pertahanan dan keamanan yang dimaksud. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Tata Kelola ...
							<i>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pertahanan dan Keamanan merupakan Tata Kelola Kelembagaan Publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan.</i>	Contoh: - Tata Kelola Komando Daerah Militer (Kodam)
		H	Operasi	97	BHA	QHA	Operasi Bidang Pertahanan Satuan: Operasi	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis atas operasi bidang pertahanan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Operasi ...
			<i>Operasi secara harfiah berarti tindakan atau gerakan militer. Operasi dapat juga diartikan luas yaitu sebagai pelaksanaan atas rencana yang telah dikembangkan dengan tujuan khusus atau tertentu.</i>				<i>Operasi Bidang Pertahanan merujuk pada operasi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara</i>	Contoh: - Operasi Teritorial Integratif Operasi Intelejen. - Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				98	BHB	QHB	Operasi Bidang Keamanan Satuan: Operasi, Hari Operasi	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis atas operasi bidang keamanan Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Operasi ...
							<i>Operasi Bidang Keamanan merujuk pada operasi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi aman masyarakat dan negara, serta fungsi penyelenggaraan keamanan dalam pemerintahan negara, yaitu keadaan tegaknya dan sekaligus juga upaya penegakan kedaulatan dan hukum negara di seluruh wilayah negara, dalam skala nasional dan dalam hubungan antar negara</i>	Contoh: - Operasi Intelijen Jaringan Kontra Separatisme - Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah
				99	BHC	QHC	Operasi Bidang Penanggulangan Bencana Satuan: Operasi	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis atas operasi bidang penanggulangan bencana Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Operasi ... - Operasi Penanganan ...
							<i>Operasi Bidang Penanggulangan Bencana merujuk pada operasi penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.</i>	Contoh: - Operasi Penanganan Darurat - Mobilisasi Dukungan Penanggulangan Krisis Kesehatan
				100	BHD	QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam Satuan: Operasi	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis atas operasi pengawasan sumber daya alam. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan secara spesifik jenis sumber daya alam yang sedang diawasi. Nomenklatur RO dimulai dengan frase - Operasi ...
							<i>Operasi Sumber Daya Alam merujuk pada operasi yang dilakukan untuk mengawasi upaya mempertahankan, melindungi, dan melestarikan eksistensi sumber daya alam, baik sumber daya alam biotik maupun abiotik di wilayah hukum Indonesia, dari gangguan pencurian dan penjarahan, penambangan ilegal dan sebagainya</i>	Contoh: - Operasi Jerat - Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
		I	Pengawasan dan Pengendalian	101	BIA	QIA	Pengawasan dan Pengendalian terhadap Produk Satuan: Produk	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal layanan pengawasan dan pengendalian terhadap suatu produk. Nomenklatur juga dapat ditambahkan jenis/bentuk/kategori atas produk yang diawasi. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pengawasan... - Pengawasan...
			<i>Pengawasan dan pengendalian adalah pengamatan seluruh kegiatan organisasi untuk mengontrol seluruh pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik yang dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain</i>				<i>Pengawasan dan Pengendalian terhadap Produk meliputi layanan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan terhadap barang dan jasa yang beredar di masyarakat</i>	Contoh: - Layanan Pengawasan Keamanan Produk Hewan - Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
				102	BIB	QIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal atas layanan pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pengawasan... - Pengawasan...
							<i>Pengawasan dan Pengendalian terhadap Masyarakat merujuk pada layanan pengawasan dan pengendalian guna mengamati perkembangan suatu masyarakat, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan preventif untuk mencegah permasalahan yang dapat merugikan pihak lain.</i>	Contoh: - Layanan Pengawasan masyarakat di bidang kewaspadaan nasional - Pengawasan kedisiplinan masyarakat
				103	BIC	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Satuan: Lembaga	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal layanan pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga. Nomenklatur juga dapat ditambahkan jenis/bentuk/kategori atas lembaga yang diawasi. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pengawasan... - Pengawasan...
							<i>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga merujuk pada layanan pengawasan dan pengendalian layanan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi suatu lembaga, baik lembaga formal maupun lembaga non formal, termasuk namun tidak terbatas pada lembaga pemerintah, badan usaha, umkm, industri, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat</i>	Contoh: - Layanan Pengawasan Syariah Lembaga Zakat - Pengawasan Siaran TV dan Radio

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				104	BID	QID	Pengawasan dan Pengendalian Kelompok Masyarakat Satuan: Kelompok Masyarakat	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal layanan pengawasan dan pengendalian terhadap suatu kelompok masyarakat. Nomenklatur juga dapat ditambahkan jenis/bentuk/kategori atas kelompok masyarakat yang diawasi. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pengawasan... - Pengawasan...
							<i>Pengawasan dan Pengendalian terhadap kelompok Masyarakat merujuk pada layanan pengawasan dan pengendalian guna mengamati perkembangan suatu kelompok masyarakat, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan preventif untuk mencegah permasalahan yang dapat merugikan pihak lain</i>	Contoh: - Layanan Pengawasan Organisasi Masyarakat
				105	BIE	QIE	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah Satuan: Pemerintah Daerah	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal layanan pengawasan dan pengendalian terhadap pemerintah daerah. Nomenklatur juga dapat ditambahkan lingkup pemerintah daerah yang diawasi. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pengawasan... - Pengawasan...
							<i>Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah merujuk pada layanan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah untuk memastikan penyelenggaraan tugas dan fungsinya berjalan secara efisien efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i>	Contoh: - Layanan Pengawasan dan Pemantauan Kinerja Pemda terhadap Standar Pelayanan Minimal ke Publik - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
				106	BIF	QIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan Satuan: Layanan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal layanan pengawasan dan pengendalian terhadap suatu layanan. Nomenklatur juga dapat ditambahkan jenis/bentuk/kategori atas layanan yang diawasi. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pengawasan... - Pengawasan...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Pengawasan dan Pengendalian Layanan merujuk pada layanan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah kepada Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga dan Badan Usaha , dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik.</i>	Contoh: - Layanan Pengawasan Keamanan Penyelenggaraan Transportasi
				107	BIG	QIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan Satuan: Layanan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis layanan pemeriksaan dan audit penerimaan yang diberikan Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Audit ... - Pemeriksaan... - Layanan Pemeriksaan ...
							<i>Pemeriksaan dan Audit Penerimaan merujuk pada layanan pemeriksaan dan audit penerimaan negara, termasuk namun tidak terbatas pada penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak lainnya</i>	Contoh: - Audit PNBP - Layanan Pemeriksaan Analisis Risiko Manual Wajib Pajak - Layanan Pemeriksaan Perpajakan
				108	BIH	QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha Satuan: Badan Usaha	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal layanan pengawasan dan pengendalian terhadap suatu badan usaha. Nomenklatur juga dapat ditambahkan jenis/bentuk/kategori atas badan usaha yang diawasi. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pengawasan... - Layanan Monitoring dan Evaluasi... - Pengawasan...
							<i>Pengawasan dan Pengendalian terhadap Badan Usaha merujuk pada layanan pengawasan dan pengendalian guna mengamati perkembangan suatu Badan Usaha, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan preventif untuk mencegah permasalahan yang dapat merugikan pihak lain.</i>	Contoh: - Layanan Pengawasan Ketaatan Bidang Usaha terhadap Peraturan Bidang LHK - Layanan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Pengolahan Migas

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				109	BII	QII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Satuan: Hektar, Layanan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal layanan pengawasan dan pengendalian terhadap lingkungan. Nomenklatur juga dapat menyebutkan lingkup/aspek lingkungan yang diawasi. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pengawasan/Monitong dan Evaluasi... - Layanan Pengawasan... - Layanan Monitoring dan Evaluasi...
							<i>Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan merujuk pada layanan pengawasan dan pengendalian terhadap lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan sebagaimana akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</i>	Contoh: - Layanan Pengawasan Pemulihan Lahan Gambut terdegradasi
		J	Penyidikan dan Pengujian	110	BJA	QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk Satuan: Produk	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal atas layanan penyidikan dan pengujian terhadap produk. Nomenklatur juga dapat ditambahkan jenis/bentuk/kategori produk yang diuji. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pengujian Mutu ... - Layanan Pengujian - Layanan Penyidikan Produk ...
			<i>Penyidikan dan Pengujian adalah serangkaian percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu (ketulenan, kecakapan, ketahanan, dsb)</i>				<i>Penyidikan dan Pengujian Produk merujuk pada layanan penyidikan dan pengujian atas suatu barang dan/jasa yang beredar di masyarakat, yang dilakukan sesuai aturan atau standar tertentu</i>	Contoh: - Layanan Pengujian Mutu Pakan - Layanan Pengujian Mutu Barang
				111	BJB	QJB	Penyidikan dan Pengujian Peralatan Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal atas layanan penyidikan dan pengujian terhadap suatu peralatan. Nomenklatur juga dapat ditambahkan jenis/bentuk/kategori peralatan yang diuji. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pengujian Mutu ... - Layanan Pengujian - Layanan Penyidikan Peralatan ...
							<i>Penyidikan dan Pengujian Peralatan merujuk layanan penyidikan dan pengujian atas suatu alat yang digunakan untuk menunjang produksi suatu barang atau jasa, atau menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di masyarakat, yang dilakukan sesuai standar atau kualitas mutu tertentu.</i>	Contoh: - Layanan Pengujian peralatan listrik rumah tangga - Layanan Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				112	BJC	QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Satuan: Sampel	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal atas layanan penyidikan dan pengujian terhadap suatu penyakit. Nomenklatur juga dapat ditambahkan jenis/kategori penyakit yang diuji. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pengujian Mutu ... - Layanan Pengujian - Layanan Penyidikan Penyakit ...
							<i>Penyidikan dan Pengujian Penyakit merujuk pada layanan pemeriksaan dan penanganan terhadap virus, bakteri, wabah dan/atau hal-hal lain yang berpotensi menimbulkan penyakit guna kepentingan preventif pencegahan penyebaran sedini mungkin</i>	Contoh: - Layanan Penyidikan dan Pengujian Wabah Penyakit Hewan - Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Bakterial
		K	Pemantauan Lapangan	113	BKA	QKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat Satuan: Orang, Kelompok Masyarakat	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/perihal/bidang layanan pemantauan terhadap masyarakat dan kelompok masyarakat. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemantauan/Pengawasan - Layanan...
			<i>Pemantauan Lapangan adalah observasi langsung guna mengamati perkembangan pelaksanaan suatu hal tertentu, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.</i>				<i>Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat merujuk pada layanan pemantauan lapangan guna mengamati perkembangan orang dan kelompok masyarakat, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.</i>	Contoh: - Layanan Pemetaan dan pemantauan kasus positif Covid-19 - Layanan Pengamatan Situasi terhadap Pelaksanaan Pemenuhan dan Perlindungan HAM
				114	BKB	QKB	Pemantauan produk Satuan: Produk	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/perihal/bidang layanan pemantauan terhadap produk. Nomenklatur juga dapat ditambahkan jenis/kategori produk yang dipantau. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemantauan/Pengawasan... - Layanan...
							<i>Pemantauan Produk merujuk pada layanan pemantauan lapangan guna mengamati perkembangan dan peredaran barang dan/atau jasa, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.</i>	Contoh: - Layanan Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Perikanan - Layanan Pengawasan Obat dan Makanan
				115	BKC	QKC	Pemantauan lembaga Satuan: Lembaga	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/perihal/bidang layanan pemantauan terhadap lembaga. Nomenklatur juga dapat ditambahkan jenis/kategori lembaga yang dipantau. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemantauan/Pengawasan... - Layanan...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Pemantauan Lembaga merujuk pada layanan pemantauan lapangan guna mengamati perkembangan lembaga, baik lembaga formal maupun lembaga non formal, termasuk namun tidak terbatas pada lembaga pemerintah, badan usaha, umkm, industri, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.</i>	Contoh: - Layanan Pemantauan Lembaga Jasa Keuangan - Layanan Pemantauan Penerapan Kebijakan Anti Korupsi
		L	Persidangan	116	BLA	QLA	Persidangan Lembaga Legislatif Satuan: Sidang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/perihal/bidang atas sidang yang dilakukan Lembaga Legislatif. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Sidang ... - Layanan Persidangan ... - Layanan Pelaksanaan Sidang ...
			<i>Persidangan adalah suatu penyelesaian masalah yang dihadiri dua atau lebih orang dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu masalah untuk mencapai suatu mufakat.</i>				<i>Persidangan Lembaga Legislatif merujuk pada layanan persidangan yang dilakukan oleh Lembaga Legislatif</i>	Contoh: - Sidang 5 Tahunan MPR - Sidang Tahunan DPR
				117	BLB	QLB	Persidangan Lembaga Eksekutif Satuan: Sidang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/perihal/bidang atas sidang yang dilakukan Lembaga Eksekutif. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Sidang ... - Layanan Persidangan ... - Layanan Pelaksanaan Sidang ...
							<i>Persidangan Lembaga Eksekutif merujuk pada layanan persidangan yang dilakukan oleh Lembaga Eksekutif.</i>	Contoh: - Sidang Kabinet Kerja Presiden - Layanan Pelaksanaan Sidang Kabinet/Ratas/Pertemuan lainnya
				118	BLC	QLC	Persidangan Lembaga Yudikatif Satuan: Sidang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/perihal/bidang atas sidang yang dilakukan Lembaga Yudikatif. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Sidang ... - Layanan Persidangan ... - Layanan Pelaksanaan Sidang ...
							<i>Persidangan Lembaga Yudikatif merujuk pada layanan persidangan yang dilakukan oleh Lembaga Yudikatif, termasuk persidangan dan penyelenggaraan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan konstitusi</i>	Contoh: - Layanan Persidangan pada Sengketa Tata Usaha Negara - Layanan Persidangan pada Sengketa Pertanahan - Layanan Persidangan pada Sengketa Pemilu - Layanan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
		M	Informasi dan Komunikasi Publik	119	BMA	QMA	Data dan Informasi Publik Satuan: Peta, Data, Dokumen	Nomenklatur RO menyebutkan secara spesifik bentuk/jenis/kategori/bidang/perihal atas data dan informasi yang dihasilkan/dikelola. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Data dan Informasi... - Data - Informasi
							<i>Data dan Informasi Publik merujuk pada data dan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.</i>	Contoh: - Data dan Informasi Sektor Transportasi - Data dan Informasi Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi
				120	BMB	QMB	Komunikasi Publik Satuan: Layanan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/perihal/bidang atas layanan komunikasi publik yang diberikan. Nomenklatur juga dapat ditambahkan isu atau objek dari layanan komunikasi publik tersebut. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Penyebaran Informasi ... - Layanan Komunikasi
							<i>Komunikasi Publik adalah layanan penyampaian dan penyebarluasan suatu informasi dan pesan kepada masyarakat atau publik</i>	Contoh: - Layanan Penyebaran Informasi Publik Program Prioritas Tema Stunting - Layanan Penyebaran Informasi terkait Pemilu Serentak
C	Kerangka Investasi Fisik	A	Sarana	121	CAA	RAA	Sarana Bidang Pendidikan Satuan: Unit, Paket	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/kategori sarana pendidikan yang dihasilkan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Alat ... - Peralatan... - (Nama Sarana)
			<i>sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan</i>				<i>Segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosial, dan kejiwaan peserta didik dalam menunjang proses belajar mengajar</i>	Contoh: - Peralatan Laboratorium Praktikum Mahasiswa - Alat Permainan Edukatif (APE)

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				122	CAB	RAB	Sarana Bidang Kesehatan Satuan: Unit, Paket	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/kategori sarana kesehatan yang dihasilkan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Alat Kesehatan ... - Obat.. - (Nama Sarana)
							<i>Segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi askes dan mutu pelayanan kesehatan, pelayanan kehesatan rujukan dan pelayanan kefarmasian serta peningkatan kegiatan promotif dan preventif.</i>	Contoh: - Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB - Alat Kesehatan dan PKRT
				123	CAC	RAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat Satuan: Unit, Paket	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/kategori sarana konektivitas darat yang dihasilkan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Alat ... - Peralatan... - (Nama Sarana)
							<i>Segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat.</i>	Contoh: - Alat Penimbang Kendaraan Bermotor - Bus Prioritas Nasional
				124	CAD	RAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara Satuan: Unit, Paket	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/kategori sarana konektivitas udara yang dihasilkan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Alat ... - Peralatan... - (Nama Sarana)
							<i>Segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan</i>	Contoh: - Peralatan dan Sistem Keamanan Penerbangan - Pesawat Kalibrasi

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				125	CAE	RAE	Sarana Bidang Konektivitas Laut Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/kategori sarana konektivitas laut yang dihasilkan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Alat ... - Peralatan... - (Nama Sarana)
							<i>segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut</i>	Contoh: - Kapal Laut - Telekomunikasi Pelayaran
				126	CAF	RAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan Satuan: Unit, Paket	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/kategori sarana pertahanan dan keamanan yang dihasilkan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Alat ... - Peralatan... - Alutsista ... - (Nama Sarana)
							<i>segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang pengelolaan sarana pertahanan meliputi pengadaan jasa konstruksi dan sarana pertahanan, sertifikasi kelaikan, kodifikasi materiil, dan pengelolaan aset/barang milik negara di bidang pertahanan.</i>	Contoh: - Alutsista Mabes TNI - Kapal Patroli Lepas Pantai 100 Meter
				127	CAG	RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/kategori sarana pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup yang dihasilkan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Alat ... - Peralatan... - (Nama Sarana)
							<i>segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi pertanian dan pembiayaan, alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida serta pengendalian pencemaran lingkungan, perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan ekosistem.</i>	Contoh: - Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen - Benih Sumber Batang Hortikultura

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				128	CAH	RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/kategori sarana bidang industri dan perdagangan yang dihasilkan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Alat ... - Peralatan... - (Nama Sarana)
							<i>segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang kerjasama, perijinan, pengembangan teknologi industri dan perdagangan, pengembangan sentra dan kawasan industri dan perdagangan yang berupa Pasar Rakyat, Gudang Non Resi Gudang, dan Pusat Distribusi untuk mendukung kelancaran distribusi arus barang.</i>	Contoh: - Peralatan Laboratorium SNSU - Sistem Pengawasan Standardisasi Industri
				129	CAI	RAI	Sarana Bidang Pengembangan Kawasan Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/kategori sarana pengembangan kawasan yang dihasilkan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Alat ... - Peralatan... - (Nama Sarana)
							<i>segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan, dengan memperhatikan segala potensi wilayah yang bersangkutan untuk didayagunakan dalam rangka meningkatkan integrasi dan konektivitas antar kawasan</i>	Contoh: - Jaringan Distribusi Air Bersih - Alat Pengolahan Sampah
				130	CAJ	RAJ	Sarana Bidang Ketenagakerjaan Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/kategori sarana bidang ketenagakerjaan yang dihasilkan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Alat ... - Peralatan... - (Nama Sarana)
							<i>Segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan SDM, perlindungan buruh migran, jaminan sosial, pengawasan, dan penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri.</i>	Contoh: - Peralatan Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas Pemerintah

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				131	CAK	RAK	Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian Satuan: Unit, Paket	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/kategori sarana konektivitas perkeretaapian yang dihasilkan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Alat ... - Peralatan... - (Nama Sarana)
							<i>Sarana Bidang Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel, termasuk namun tidak terbatas pada lokomotif, gerbong kereta penumpang, gerbong kereta barang dan peralatan khusus kereta api</i>	Contoh: - Rangkaian Kereta (gerbong kereta)
				132	CAL	RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/kategori sarana kemaritiman, kelautan dan perikanan yang dihasilkan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Alat ... - Peralatan... - (Nama Sarana)
							<i>Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan merujuk pada segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama pada pelaksanaan pekerjaan di bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan</i>	Contoh: - Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan - Speedboat Pengawas
				133	CAM	RAM	Sarana Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/kategori sarana pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan yang dihasilkan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Alat ... - Peralatan... - (Nama Sarana)
							<i>Segala jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau alat pendukung dalam pelaksanaan aktivitas bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, dan kearsipan.</i>	Contoh: - Mesin Tiket Otomatis Kebun Binatang Ragunan
				134	CAN	RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/kategori sarana teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Alat ... - Peralatan... - (Nama Sarana)
							<i>Segala jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau alat pendukung dalam pelaksanaan aktivitas bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	Contoh: - Peralatan Transmisi Siaran

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				135	CAO	RAO	Sarana Bidang IPTEK Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/kategori sarana bidang IPTEK yang dihasilkan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Alat ... - Peralatan... - (Nama Sarana)
							<i>Segala jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau alat pendukung dalam pelaksanaan aktivitas bidang IPTEK.</i>	Contoh: - Teropong Binokular - Mikroskop Ultraviolet
				136	CAP	RAP	Sarana Bidang Penanggulangan Bencana Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/kategori sarana penanggulangan bencana yang dihasilkan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Alat ... - Peralatan... - (Nama Sarana)
							<i>Segala jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau alat pendukung dalam pelaksanaan aktivitas Bidang Penanggulangan Bencana</i>	Contoh: - Mobil Pemadam Kebakaran - Kapsul Tsunami
				137	CAQ	RAQ	Sarana Bidang Hukum Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/kategori sarana bidang hukum yang dihasilkan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Alat ... - Peralatan... - (Nama Sarana)
							<i>Segala jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau alat pendukung dalam pelaksanaan kegiatan/aktivitas/fasilitasi di bidang Hukum</i>	Contoh: - ICT dan Sarana Prasarana Persidangan Online sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan
		B	Prasarana	138	CBA	RBA	Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian Satuan: Unit, km	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk prasarana bidang konektivitas perkeretaapian yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Stasiun ... - Jalur KA... - (Nama Prasarana Perkeretaapian)
			<i>Prasarana merujuk pada definisi Prasaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (pada umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak)</i>				<i>Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian mencakup jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan untuk melayani publik</i>	Contoh: - Jalur KA Trans Sumatera - Stasiun Kereta Api

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				139	CBB	RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman Satuan: Unit, Hektar	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis /bentuk prasarana bidang perumahan dan permukiman yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rumah Susun - Permukiman - (Nama Prasarana Perumahan dan Pemukiman)
							<i>Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman mencakup bangunan atau kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman</i>	Contoh: - Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI
				140	CBC	RBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) Satuan: km	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan tipe/kategori jalan yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pelebaran Jalan ... - Jalan
							<i>Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) merujuk pada bangunan jalan</i>	Contoh: - Pelebaran Jalan Menambah Lajur - Jalan Trans Papua
				141	CBD	RBD	Prasarana Bidang Konektivitas Laut Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/kategori prasarana bidang konektivitas laut yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pelabuhan ... - Bangunan ...
							<i>Prasarana Bidang Konektivitas Laut merujuk pada bangunan penunjang angkutan laut dan/atau kegiatan perhubungan laut lainnya, seperti pelabuhan dan bangunan penunjang angkutan laut lainnya</i>	Contoh: - Pelabuhan Domestik Sekupang

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				142	CBE	RBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/kategori prasarana bidang konektivitas udara yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Bandara - Bangunan ...
							<i>Prasarana Bidang Konektivitas Udara merujuk pada bangunan penunjang angkutan udara dan/atau kegiatan perhubungan udara lainnya, seperti bandar udara dan penunjang angkutan udara lainnya.</i>	Contoh: - Bandara Taliabu - Bandara Yogyakarta International Airport
				143	CBF	RBF	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) Satuan: m	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/kategori jembatan yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Jembatan ...
							<i>Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) merujuk pada bangunan jembatan</i>	Contoh: - Jembatan Trans Papua
				144	CBG	RBG	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/kategori prasarana bidang SDA dan Irigasi yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Embung ... - Bendungan ... - Jaringan irigasi
							<i>Prasarana Bidang SDA dan Irigasi merujuk pada Definisi Prasarana Sumber Daya Air mencakup bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung</i>	Contoh: - Embung air baku - Jaringan irigasi rawa - Bendungan Komering II

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				145	CBH	RBH	Prasarana Bidang Penanggulangan Bencana Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/kategori prasarana bidang penanggulangan bencana yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - (Nama prasarana)
							<i>Prasarana Bidang Penanggulangan Bencana merujuk pada bangunan yang menunjang kegiatan penanggulangan bencana.</i>	Contoh: - Kanal banjir - Stasiun pompa banjir
				146	CBI	RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/kategori prasarana bidang pendidikan dasar dan menengah yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Renovasi ... - (Nama Prasarana Penunjang)
							<i>Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mencakup prasarana yang diperuntukan guna menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pendidikan dasar dan menengah, baik pada tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) maupun Sekolah Luar Biasa</i>	Contoh: - Asrama pada Pondok Pesantren - Renovasi Gedung Sekolah Dasar
				147	CBJ	RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/kategori prasarana bidang pendidikan tinggi yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Bangunan ... - Gedung....
							<i>Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi merujuk pada bangunan yang menunjang pendidikan tinggi, termasuk prasarana yang mendukung pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</i>	Contoh: - Bangunan/Gedung Pendidikan Tinggi Vokasi Industri

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				148	CBK	RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/kategori prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Laboratorium ... - (Nama Prasarana Penunjang)....
							<i>Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup merujuk pada bangunan yang menunjang kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan lingkungan hidup</i>	Contoh: - Laboratorium Pengelolaan Hutan - Irigasi Perpipaan
				149	CBL	RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/kategori prasarana bidang industri dan perdagangan yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pasar ... - (Nama Prasarana Penunjang)
							<i>Prasarana Bidang Industri adalah segala sesuatu yang merupakan bangunan atau prasaranan penunjang utama terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri</i>	Contoh: - Pasar Rakyat - Pusat Jajanan Kuliner
				150	CBM	RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/kategori prasarana bidang pertahanan dan keamanan yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rumah Dinas ... - Pos Kawasan ... - (Nama Prasarana Penunjang)
							<i>Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan merujuk pada prasarana bangunan yang mendukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan</i>	Contoh: - Rumah Dinas Prajurit - Pos Kawasan Perbatasan

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				151	CBN	RBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/kategori prasarana bidang pariwisata dan kebudayaan yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Muesum ... - Pariwisata - (Nama Prasarana Penunjang)
							<i>Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan merujuk pada bangunan yang menunjang kegiatan di bidang pariwisata, kebudayaan, dan kearsipan</i>	Contoh: - Museum Musik Indonesia - Amenitas Wisata
				152	CBO	RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan Satuan: Hektar, Bidang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/kategori prasarana pengembangan kawasan yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Kawasan
							<i>Prasarana Pengembangan Kawasan merujuk pada prasarana yang dibangun pada suatu kawasan tertentu dengan memperhatikan segala potensi wilayah yang bersangkutan untuk didayagunakan dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi wilayah serta integrasi dan konektivitas antar kawasan</i>	Contoh: - Kawasan Food Estate
				153	CBP	RBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/kategori prasarana bidang konektivitas darat yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Terminal ... - Pelabuhan ... - (Nama Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
							<i>Prasarana Bidang Konektivitas Darat merujuk pada Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung lainnya</i>	Contoh: - Terminal Penumpang - Pelabuhan penyeberangan

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				154	CBQ	RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/kategori prasarana bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pasar Ikan ... - Balai/Gedung... - (Nama Prasarana Penunjang)
							<i>Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan merujuk pada bangunan atau fasilitas penunjang yang berfungsi sebagai alat pendukung pada pelaksanaan pekerjaan di bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan</i>	Contoh: - Pasar Ikan - Balai Pertemuan Nelayan
				155	CBR	RBR	Dukungan Teknis Satuan: Dokumen	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/perihal dokumen teknis penunjang proyek. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan nama proyek yang didukung oleh dokumen teknis tersebut, khususnya dalam hal RO merupakan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Dokumen ... - Desain...
							<i>Dukungan Teknis merujuk pada dokumen-dokumen yang menjadi acuan teknis dalam menyusun perencanaan suatu proyek, meliputi namun tidak terbatas pada dokumen survei, Detail Engineering Design (DED), studi kelayakan (FS).</i>	Contoh: - Dokumen Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>) - Desain Penyediaan Air Baku
				156	CBS	RBS	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air Satuan: Km	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/kategori prasarana jaringan sumber daya air yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Waduk ... - Jaringan ...
							<i>Prasarana Jaringan Sumber Daya Air merujuk pada bangunan dan fasilitas penunjang pelaksanaan pekerjaan di bidang jaringan sumber daya air</i>	Contoh: - Waduk - Jaringan Pipa Transmisi

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				157	CBT	RBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Satuan: Unit, Kab/Kota, Kecamatan, Titik/Lokasi	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/kategori prasarana bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Satelit - (Nama Prasarana Penunjang)
							<i>Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi merujuk pada segala jenis peralatan, bangunan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan pekerjaan di bidang teknologi dan komunikasi</i>	Contoh: - Satelit Satria
				158	CBU	RBV	Prasarana Bidang IPTEK Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/kategori prasarana bidang IPTEK yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Laboratorium ... - (Nama Prasarana Penunjang)....
							<i>Prasarana Bidang IPTEK merujuk pada segala bangunan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat pendukung pada pelaksanaan pekerjaan di bidang IPTEK.</i>	Contoh: - Laboratorium Penyidikan dan Pengujian Veteriner
				159	CBV	RBV	Prasarana Bidang Kesehatan Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/kategori prasarana bidang kesehatan yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Laboratorium ... - (Nama Prasarana Penunjang)....
							<i>Prasarana Bidang Kesehatan merujuk pada segala bangunan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat pendukung pada pelaksanaan pekerjaan di bidang kesehatan.</i>	Contoh: - Laboratorium Farmasi Terpadu Unit A

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				160	CBW	RBW	Prasarana Bidang Hukum Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/kategori prasarana bidang hukum yang dibangun, dikembangkan, ditingkatkan atau direhabilitasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Gedung ... - (Nama Prasarana Penunjang)
							<i>Prasarana Bidang Hukum merujuk pada segala jenis bangunan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat pendukung pada pelaksanaan pekerjaan di bidang Hukum.</i>	Contoh: - Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A - Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
		C	OP Sarana	161	CCA	RCA	OP Sarana Bidang Pendidikan Satuan: Unit, Paket	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk sarana bidang pendidikan yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
			<i>OP (Operasi & Pemeliharaan) merujuk pada layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan aset sehingga terus memberikan layanan yang dapat diterima dan mencapai usia yang diharapkan.</i>				<i>OP Sarana Bidang Pendidikan adalah layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan sarana pendidikan baik di jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Sarana Pembelajaran
				162	CCB	RCB	OP Sarana Bidang Kesehatan Satuan: Unit, Paket	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk sarana bidang kesehatan yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Sarana Bidang Kesehatan adalah layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan sarana kesehatan</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Alat Kesehatan - Layanan Pemeliharaan Sistem Informasi Penyakit Menular

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				163	CCC	RCC	OP Sarana Bidang Konektivitas Darat Satuan: Unit, Paket	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk sarana bidang konektivitas darat yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Sarana Bidang Konektivitas Darat adalah layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan sarana konektivitas darat meliputi namun tidak terbatas pada moda transportasi darat seperti bus, kereta api, truk, dsb</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Layanan Pemeliharaan Bus Air
				164	CCD	RCD	OP Sarana Bidang Konektivitas Udara Satuan: Unit, Paket	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk sarana bidang konektivitas udara yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Sarana Bidang Konektivitas Udara adalah layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan sarana konektivitas udara meliputi namun tidak terbatas pada moda transportasi udara seperti pesawat, helikopter, jet, dsb</i>	Contoh: - Layanan Perbaikan Peralatan Bidang Keamanan Penerbangan
				165	CCE	RCE	OP Sarana Bidang Konektivitas Laut Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk sarana bidang konektivitas laut yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>OP Sarana Bidang Konektivitas Laut adalah layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan sarana konektivitas laut meliputi namun tidak terbatas pada moda transportasi laut seperti kapal penumpang, kapal barang, dsb</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran - Layanan Pemeliharaan Kepelabuhanan
				166	CCF	RCF	OP Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan Satuan: Paket, Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk sarana bidang pertahanan dan keamanan yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan adalah layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan sarana pertahanan dan keamanan meliputi namun tidak terbatas pada senjata, munisi, kendaraan tempur, dsb</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Alutsista - Layanan Pemeliharaan Almatsus
				167	CCG	RCG	OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup adalah layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan sarana di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan lingkungan hidup.</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				168	CCH	RCH	OP Sarana Bidang Industri dan Perdagangan Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk sarana bidang industri dan perdagangan yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Sarana Bidang Industri dan Perdagangan adalah layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan sarana di bidang industri dan perdagangan.</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Alat uji SNI di lingkungan Industri - Layanan Pemeliharaan Ruang Lingkup Pelayanan Sertifikasi
				169	CCI	RCI	OP Sarana Pengembangan Kawasan Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk sarana pengembangan kawasan yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Sarana Pengembangan Kawasan adalah layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan sarana yang mendukung pengembangan suatu kawasan</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Eskavator - Layanan Pemeliharaan Kawasan Waduk dan DTA
				170	CCJ	RCJ	OP Sarana Bidang Ketenagakerjaan Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk sarana bidang ketenagakerjaan yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Sarana Bidang Ketenagakerjaan adalah layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan sarana bidang Ketenagakerjaan</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Peralatan Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas Pemerintah

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				171	CCK	RCK	OP Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian Satuan: Unit, Paket	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk sarana bidang konektivitas perkeretaapian yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian adalah layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan sarana bidang perkeretaapian seperti gerbong kereta penumpang dan gerbong kereta barang</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Gerbong Kereta
				172	CCL	RCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer
				173	CCM	RCM	OP Sarana Bidang Penanggulangan Bencana Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk sarana bidang penanggulangan bencana yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Sarana Bidang Penanggulangan Bencana adalah layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan sarana bidang penanggulangan bencana.</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Rescue Truck - Layanan Pemeliharaan Mobil Pemadam Kebakaran - Layanan Pemeliharaan Peralatan Pendukung SAR

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				174	CCN	RCN	OP Sarana Bidang IPTEK Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk sarana bidang IPTEK yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Sarana Bidang IPTEK adalah layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan sarana bidang IPTEK.</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Teropong Bintang
		D	OP Prasarana	175	CDA	RDA	OP Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian Satuan: km	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk prasarana bidang konektivitas perkeretaapian yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
			<i>OP (Operasi dan Pemeliharaan) adalah layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan aset prasarana pada bidang tertentu</i>				<i>OP Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian adalah layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan prasarana bidang perkeretaapian</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Jalur KA antara Surabaya - Banyuwangi - Layanan Pemeliharaan Jalur KA antara Banjar - Kroya
				176	CDB	RDB	OP Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman Satuan: Unit, Hektar	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk prasarana bidang perumahan dan permukiman yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman merujuk pada layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan prasarana bidang Perumahan dan Permukiman</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Khusus - Layanan Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				177	CDC	RDC	OP Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) Satuan: km	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta tipe/kategori jalan yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) merujuk layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan prasarana jalan</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Rutin Jalan Baru
				178	CDD	RDD	OP Prasarana Bidang Konektivitas Laut Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk prasarana bidang konektivitas laut yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Prasarana Bidang Konektivitas Laut merujuk pada layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan prasarana bidang Bidang Konektivitas Laut, antara lain bangunan penunjang angkutan laut dan/atau kegiatan perhubungan laut lainnya, seperti pelabuhan dan bangunan penunjang angkutan laut lainnya.</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Pengerukan Alur Pelayaran - Layanan Pemeliharaan Pelabuhan Penumpang
				179	CDE	RDE	OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk prasarana bidang konektivitas udara yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara merujuk pada layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan prasarana bidang Konektivitas Udara, antara lain bangunan penunjang angkutan udara dan/atau kegiatan perhubungan udara lainnya, seperti bandar udara dan penunjang angkutan udara lainnya.</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Bandar Udara Ilaga - Layanan Pemeliharaan Bandar Udara Taliabu
				180	CDF	RDF	OP Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) Satuan: m	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta tipe/kategori jembatan yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) merujuk layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan bangunan jembatan.</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Rutin Jembatan
				181	CDG	RDG	OP Prasarana Bidang SDA dan Irigasi Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk prasarana bidang SDA dan irigasi yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Prasarana Bidang SDA dan Irigasi merujuk pada layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Bendungan
				182	CDH	RDH	OP Prasarana Penanggulangan Bencana Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk prasarana bidang penanggulangan bencana yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>OP Bidang Penanggulangan Bencana merujuk pada layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan bangunan yang menunjang kegiatan penanggulangan bencana</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Bangunan Pengendali Banjir
				183	CDI	RDI	OP Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk prasarana bidang pendidikan dasar dan menengah yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah merujuk pada klayanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan prasarana pendidikan dasar dan/atau menengah</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Ruang Kelas - Layanan Pemeliharaan Laboratorium
				184	CDJ	RDJ	OP Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk prasarana bidang pendidikan tinggi yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi merujuk pada layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan prasarana pendidikan tinggi, termasuk prasarana yang mendukung pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Aset Politeknik Pekerjaan Umum
				185	CDK	RDK	OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup merujuk pada layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan bangunan yang menunjang kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan lingkungan hidup.</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Prasarana Lab. Pengujian Pakan
				186	CDL	RDL	OP Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk prasarana bidang industri dan perdagangan yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan merujuk pada layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan prasarana bidang industri dan perdagangan</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Pasar Tradisional
				187	CDM	RDM	OP Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk prasarana bidang pertahanan dan keamanan yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan merujuk pada layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan prasarana bidang pertahanan dan keamanan nasional.</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Pangkalan Militer TNI AU - Layanan Pemeliharaan Fasilitas Latihan/Tempur
				188	CDN	RDN	OP Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk prasarana bidang pariwisata dan kebudayaan yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>OP Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan merujuk pada layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan prasarana bidang pariwisata, kebudayaan, dan kearsipan.</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Museum - Layanan Pemeliharaan Cagar Budaya
				189	CDO	RDO	OP Prasarana Pengembangan Kawasan Satuan: Hektar, Bidang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk prasarana bidang pengembangan kawasan yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Prasarana Pengembangan Kawasan adalah layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan prasarana yang mendukung pengembangan suatu kawasan</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Kawasan Industri Brebes Jawa Tengah ke Batang
				190	CDP	RDP	OP Prasarana Bidang Konektivitas Darat Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk prasarana bidang konektivitas darat yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Prasarana Bidang Konektivitas Darat adalah layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan prasarana bidang konektivitas darat</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A - Layanan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai
				191	CDQ	RDQ	OP Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk prasarana bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>OP Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan merujuk pada layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan prasarana bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Gedung UPT Pelabuhan Muara Baru
				192	CDR	RDR	OP Prasarana Jaringan Sumber Daya Air Satuan: km	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta tipe/kategori jaringan sumber daya air yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Prasarana Jaringan Sumber Daya Air merujuk pada layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan prasarana jaringan sumber daya air.</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Irigasi Air Tanah - Layanan Pemeliharaan Jaringan Air Baku
				193	CDS	RDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Satuan: Unit, Kab/Kota, Kecamatan, Titik/Lokasi	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk prasarana bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Prasarana Jaringan Sumber Daya Air merujuk pada layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan prasarana bidang teknologi informasi dan komunikasi</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Perangkat Sistem Transmisi Satelit
				194	CDT	RDT	OP Prasarana Bidang IPTEK Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk prasarana bidang IPTEK yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>OP Prasarana Bidang IPTEK merujuk pada layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan prasarana bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan Laboratorium Penyidikan dan Pengujian Veteriner
				195	CDU	RDU	OP Prasarana Bidang Hukum Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk prasarana bidang hukum yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Prasarana Bidang Hukum merujuk pada layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan prasarana bidang Hukum.</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Tahanan
				196	CDV	RDV	OP Prasarana Bidang Kesehatan Satuan: Unit	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk layanan OP yang diberikan serta jenis/bentuk prasarana bidang kesehatan yang mendapatkan layanan OP sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lokasi khusus berdasarkan prioritas pembangunan dan/atau penugasan presiden tertentu. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeliharaan/Perbaikan/Operasional
							<i>OP Prasarana Bidang Kesehatan merujuk pada layanan operasi harian, perawatan dan perbaikan normal, penggantian suku cadang dan komponen struktural, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk melestarikan prasarana bidang Kesehatan.</i>	Contoh: - Layanan Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Sakit
		E	Konservasi	197	CEA	REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem Satuan: Hektar	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/ jenis/lingkup dari layanan konversi kawasan atau rehabilitasi ekosistem. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan klasifikasi kawasan dan ekosistem yang dikonservasi atau direhabilitasi Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Konservasi...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
D			Konservasi merujuk pada pengelolaan, pemulihan dan pem sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya				Konservasi Kawasan/Rehabilitasi merujuk pada layanan pengelolaan, pemulihan dan pelestarian suatu daerah tertentu yang di dalamnya terdapat dan/atau terkandung sumber daya alam hayati dan ekosistem, termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan kawasan suaka alam, cagar alam, suaka margasatwa, cagar biosfer, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dilakukan oleh unit/instansi berwenang sesuai tugas dan fungsinya	Contoh: - Konservasi Cagar Alam - Rehabilitasi Kawasan Mangrove
				198	CEB	REB	Konservasi Jenis/Spesies Satuan: Spesies, Lokasi	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/ jenis/lingkup dari layanan konversi kawasan hewan. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan spesies/klasifikasi dari hewan yang dikonservasi Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Konservasi...
							Konservasi Jenis/Spesies merujuk pada layanan pengelolaan, pemulihan dan pelestarian sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) oleh unit/instansi berwenang sesuai tugas dan fungsinya	Contoh: - Konservasi Tumbuhan Terancam - Konservasi Gajah Sumatera
	Kerangka investasi SDM dan Sosial Ekonomi	A	Pendidikan Vokasi	199	DAA	SAA	Pendidikan Vokasi Bidang Komunikasi dan Informatika Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk atau jenis layanan pendidikan vokasi di bidang Komunikasi dan informatika. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pendidikan...
			Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi yang memiliki program studi ilmu terapan atau kejuruan, termasuk di dalamnya program diploma dan program sarjana terapan				Pendidikan Vokasi Bidang Komukasi dan Informatika merujuk pada Pendidikan Vokasi dalam bidang Komunikasi dan Informatika	Contoh: - Pendidikan Menengah Kejuruan bidang Komunikasi dan Informatika
				200	DAB	SAB	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk atau jenis layanan pendidikan vokasi di bidang infrastruktur. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pendidikan...
							Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur merujuk pada Pendidikan Vokasi dalam Bidang Infrastruktur	Contoh: - Pendidikan Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung - Pendidikan Teknologi Konstruksi Bangunan Air
				201	DAC	SAC	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk atau jenis layanan pendidikan vokasi bidang Pertanian dan Perikanan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pendidikan...
							Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan merujuk pada Pendidikan Vokasi dalam Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Contoh: - Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan - Pendidikan Vokasi Pertanian dan Perikanan

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				202	DAD	SAD	Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik bentuk atau jenis layanan pendidikan vokasi bidang industri Pariwisata dan Kebudayaan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pendidikan...
							<i>Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata dan Kebudayaan merujuk pada Pendidikan Vokasi dalam Bidang Pariwisata dan Kebudayaan</i>	Contoh: - Pendidikan Politeknik Pariwisata Lombok
				203	DAE	SAE	Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk atau jenis layanan pendidikan Vokasi di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pendidikan...
							<i>Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup merujuk pada Pendidikan Vokasi dalam Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</i>	Contoh: - Pendidikan Menengah Kejuruan bidang Kehutanan
				204	DAF	SAF	Pendidikan Vokasi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk atau jenis layanan pendidikan vokasi bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pendidikan...
							<i>Pendidikan Vokasi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial merujuk merujuk pada Pendidikan Vokasi dalam Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial</i>	Contoh: - Pendidikan Teknik Elektromedika - Pendidikan Vokasi Keperawatan
				205	DAG	SAG	Pendidikan Vokasi Bidang industri Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk atau jenis layanan pendidikan vokasi bidang Industri. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pendidikan...
							<i>Pendidikan Vokasi Bidang Industri merujuk merujuk pada Pendidikan Vokasi dalam Bidang Industri</i>	Contoh: - Pendidikan Kejuruan Berbasis Industri
		B	Pendidikan	206	DBA	SBA	Pendidikan Tinggi Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/tipe/klasifikasi atas layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam koordinasi Pemerintah. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pendidikan...
			<i>Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan mencakup jenjang pendidikan formal maupun pendidikan non-formal</i>				<i>Pendidikan Tinggi merupakan pendidikan formal yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri dalam koordinasi Pemerintah</i>	Contoh: - Pendidikan Tinggi Bidang Teknologi Nuklir - Pendidikan Diploma IV, Strata 1 dan Pendidikan Pelatihan Teknis
				207	DBB	SBB	Pendidikan Menengah Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/tipe/klasifikasi atas layanan penyelenggaraan pendidikan menengah dalam koordinasi Pemerintah. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pendidikan...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Pendidikan Menengah merupakan pendidikan formal yang mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dalam koordinasi Pemerintah, baik yang berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah (MA) maupun bentuk lain yang sederajat</i>	Contoh: - Pendidikan Madrasah Unggulan
				208	DBC	SBC	Pendidikan Dasar Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/tipe/klasifikasi atas layanan penyelenggaraan pendidikan dasar dalam koordinasi Pemerintah. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pendidikan...
							<i>Pendidikan Dasar adalah merupakan pendidikan formal yang mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dalam koordinasi Pemerintah, baik yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun bentuk lain yang sederajat</i>	Contoh: - Pendidikan Dasar Keagamaan
				209	DBD	SBD	Pendidikan Pra-Sekolah Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/tipe/klasifikasi atas layanan penyelenggaraan pendidikan prasekolah dalam koordinasi Pemerintah. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pendidikan...
							<i>Pendidikan Pra-Sekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan di luar sekolah.</i>	Contoh: - Pendidikan Anak Pra-Sekolah
				210	DBE	SBE	Pendidikan Non Gelar Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/tipe/klasifikasi atas layanan penyelenggaraan pendidikan non gelar dalam koordinasi Pemerintah. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pendidikan...
							<i>Pendidikan Non Gelar adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di universitas, institusi riset dan/atau lembaga diklat dan pelatihan profesional di dalam dan luar negeri di bawah koordinasi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta pada bidang-bidang tertentu yang lebih spesifik guna mendukung program penguatan sistem inovasi nasional dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di Instansi yang bersangkutan.</i>	Contoh: - Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional - Pendidikan Pemantapan Pimpinan Daerah

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
		C	Pelatihan	211	DCA	SCA	Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis pelatihan bidang komunikasi dan informatika. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan kelompok/klasifikasi penerima manfaat. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pelatihan ...
			<i>Pelatihan mencakup pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi ilmu terapan, serta peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja pada bidang tertentu;</i>				<i>Pelatihan bidang Komunikasi dan Informatika meliputi pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi ilmu terapan bidang komunikasi dan informatika, serta pelatihan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan keahlian pada bidang komunikasi dan informatika, yang diberikan oleh profesional / institusi sesuai keahlian dan kompetensinya</i>	Contoh: - Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika - Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat
				212	DCB	SCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis pelatihan bidang infrastruktur. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan kelompok/klasifikasi penerima manfaat. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pelatihan ...
							<i>Pelatihan bidang Infrastruktur meliputi pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi ilmu terapan bidang infrastruktur, serta pelatihan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan keahlian pada bidang infrastruktur, yang diberikan oleh profesional / institusi sesuai keahlian dan kompetensinya</i>	Contoh: - Pelatihan Pembangunan Infrastruktur - Pelatihan Teknis Bidang Transportasi Darat
				213	DCC	SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis pelatihan bidang pertanian dan perikanan. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan kelompok/klasifikasi penerima manfaat. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pelatihan ...
							<i>Pelatihan bidang Pertanian dan Perikanan meliputi pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi ilmu terapan bidang Pertanian dan Perikanan, serta pelatihan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan keahlian pada bidang Pertanian dan Perikanan, yang diberikan oleh profesional / institusi sesuai keahlian dan kompetensinya</i>	Contoh: - Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan - Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur
				214	DCD	SCD	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis pelatihan bidang pariwisata dan kebudayaan. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan kelompok/klasifikasi penerima manfaat. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pelatihan ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Pelatihan bidang Pariwisata dan Kebudayaan meliputi pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi ilmu terapan bidang Pariwisata dan Kebudayaan, serta pelatihan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan keahlian pada bidang Pariwisata dan Kebudayaan, yang diberikan oleh profesional / institusi sesuai keahlian dan kompetensinya</i>	Contoh: - Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Poltekpar Bali - Pelatihan SDM Pariwisata untuk Pembekalan Kerja
				215	DCE	SCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis pelatihan bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan kelompok/klasifikasi penerima manfaat. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pelatihan ...
							<i>Pelatihan bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup meliputi pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi ilmu terapan bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta pelatihan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan keahlian pada bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yang diberikan oleh profesional / institusi sesuai keahlian dan kompetensinya</i>	Contoh: - Pelatihan Vokasi Bidang LHK Berorientasi industri dan wirausaha - Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lingkungan untuk Masyarakat
				216	DCF	SCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis pelatihan bidang ekonomi dan keuangan. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan kelompok/klasifikasi penerima manfaat. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pelatihan ...
							<i>Pelatihan bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi bidang Ekonomi dan Keuangan, serta pelatihan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan keahlian pada bidang Ekonomi dan Keuangan, yang diberikan oleh profesional / institusi sesuai keahlian dan kompetensinya</i>	Contoh: - Pelatihan Skema PNBP - Pelatihan Bidang Kepabeanaan
				217	DCG	SCG	Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis pelatihan bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan kelompok/klasifikasi penerima manfaat. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pelatihan ...
							<i>Pelatihan bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan meliputi pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi ilmu terapan bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, serta pelatihan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan keahlian pada bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, yang diberikan oleh profesional / institusi sesuai keahlian dan kompetensinya</i>	Contoh: - Pelatihan dan Simulasi Keprotokolan - Pelatihan Wawasan Kebangsaan

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				218	DCH	SCH	Pelatihan Bidang Industri Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis pelatihan bidang industri. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan kelompok/klasifikasi penerima manfaat. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pelatihan ...
							<i>Pelatihan bidang Industri meliputi pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi ilmu terapan bidang Industri, serta pelatihan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan keahlian pada bidang Industri, yang diberikan oleh profesional / institusi sesuai keahlian dan kompetensinya</i>	Contoh: - Pelatihan di Bidang Standardisasi Industri - Pelatihan Peningkatan Produktivitas
				219	DCI	SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis pelatihan bidang pendidikan. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan kelompok/klasifikasi penerima manfaat. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pelatihan ...
							<i>Pelatihan bidang Pendidikan meliputi pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi ilmu terapan bidang Pendidikan dan kearsipan, serta pelatihan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan keahlian pada bidang Pendidikan dan kearsipan, yang diberikan oleh profesional / institusi sesuai keahlian dan kompetensinya</i>	Contoh: - Pelatihan Kompetensi Guru dalam Bidang Bahasa - Pelatihan Calon Pelatih Pemanfaatan Model Bidang Peningkatan Pendidik
				220	DCJ	SCJ	Pelatihan Bidang Sosial Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis pelatihan bidang sosial. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan kelompok/klasifikasi penerima manfaat. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pelatihan ...
							<i>Pelatihan bidang Sosial meliputi pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi ilmu terapan bidang Sosial, serta pelatihan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan keahlian pada bidang Sosial, yang diberikan oleh profesional / institusi sesuai keahlian dan kompetensinya</i>	Contoh: - Pelatihan Panitia Pelaksana Ibadah Haji - Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support
				221	DCK	SCK	Pelatihan Bidang Penanggulangan Bencana Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis pelatihan bidang penanggulangan bencana. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan kelompok/klasifikasi penerima manfaat. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pelatihan ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Pelatihan Bidang Penanggulangan Bencana meliputi pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi ilmu terapan bidang penanggulangan bencana, serta pelatihan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan keahlian pada bidang tersebut, yang diberikan oleh profesional / institusi sesuai keahlian dan kompetensinya</i>	Contoh: - Pelatihan Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana - Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana
				222	DCL	SCL	Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis pelatihan bidang ekonomi kreatif. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan kelompok/klasifikasi penerima manfaat. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pelatihan ...
							<i>Pelatihan bidang Ekonomi Kreatif meliputi pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi ilmu terapan bidang ekonomi kreatif, serta pelatihan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan keahlian pada bidang ekonomi kreatif, yang diberikan oleh profesional / institusi sesuai keahlian dan kompetensinya</i>	Contoh: - Pelatihan Pengelolaan <i>Online Shop</i> bagi UMKM
				223	DCM	SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis pelatihan bidang kesehatan. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan kelompok/klasifikasi penerima manfaat. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pelatihan ...
							<i>Pelatihan bidang Kesehatan meliputi pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi ilmu terapan bisang kesehatan, serta pelatihan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan keahlian pada bidang kesehatan, yang diberikan oleh profesional / institusi sesuai keahlian dan kompetensinya</i>	Contoh: - Pelatihan Bidang Kesehatan Tradisional
				224	DCN	SCN	Pelatihan Bidang IPTEK Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis pelatihan bidang IPTEK. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan kelompok/klasifikasi penerima manfaat. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pelatihan ...
							<i>Pelatihan bidang IPTEK meliputi pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi ilmu terapan bidang IPTEK, serta pelatihan yang berorientasi padapeningkatan keterampilan dan keahlian pada bidang IPTEK, yang diberikan oleh profesional / institusi sesuai keahlian dan kompetensinya</i>	Contoh: - Pelatihan Pengelolaan Laboraturium bagi Pranata Laboraturium Pendidikan

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				225	DCO	SCO	Pelatihan Vokasi Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis pelatihan vokasi. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan kelompok/klasifikasi penerima manfaat. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pelatihan ...
							<i>Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat demi meningkatkan keterampilan jangka panjang dengan durasi pembelajaran singkat (sekitar 1 bulan hingga 6 bulan), yang diberikan oleh profesional / institusi sesuai keahlian dan kompetensinya</i>	Contoh: - Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) UPTP
		D	Penelitian dan Pengembangan	226	DDA	SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk Satuan: Produk	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/bidang/perihal atas produk hasil penelitian dan pengembangan Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Produk
			<i>Penelitian adalah upaya yang dilakukan dengan metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah dalam rangka menciptakan barang/produk, purwa awal (prototype), dan model matematika.</i> <i>Pengembangan adalah upaya peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tersebut.</i>				Keluaran dari Penelitian dan Pengembangan berupa Barang/Produk	Contoh: - Produk Biologi Hasil Riset Perikanan - Produk Suplemen Kesehatan Berbasis Black Garlic
				227	DDB	SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa Satuan: Purwarupa	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/bidang/perihal atas purwarupa hasil penelitian dan pengembangan Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Purwarupa - Prototipe
							<i>Keluaran dari Penelitian dan Pengembangan adalah rupa pertama/rupa awal (prototype)</i>	Contoh: - Purwarupa Material Fasilitas dan Jasa Polri - Prototipe Ina-Buoy - Prototipe Material Dosimeter

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				228	DDC	SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling Satuan: Model, Desain	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/ jenis/bidang/perihal atas model atau inovasi yang diteliti atau dikembangkan Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Model ... - Model Pengembangan...
							<i>Keluaran dari Penelitian dan Pengembangan adalah model/inovasi</i>	Contoh: - Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang - Model/Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN - Model Komputasi
				229	DDD	SDD	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan Satuan: Kekayaan Intelektual	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/ bentuk/perihal/bidang atas hasil Penelitian dan Pengembangan yang mendapatkan hak paten dalam jangka waktu tertentu sesuai perundang-undangan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: -Kekayaan Intelektual
							<i>Keluaran dari Penelitian dan Pengembangan yang telah mendapatkan hak eksklusif (paten) dari negara untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan pada Undang-undang tentang Paten</i>	Contoh: - Kekayaan Intelektual Teknologi Industri Agro - Kekayaan Intelektual Teknologi Industri IMLATE
E	Administrasi Pemerintahan internal K/L	B	Dukungan Manajemen Internal	230	EBA		<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i> <i>Satuan: Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit</i>	RO Generik menggunakan nomenklatur: 994 Layanan Perkantoran 957 Layanan Hukum 958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 959 Layanan Protokol 962 Layanan Umum 969 Layanan Bantuan Hukum 963 Layanan Data dan Informasi 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 956 Layanan BMN
			<i>Dukungan Manajemen Internal merujuk pada barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi internal kementerian/lembaga</i>				<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal adalah layanan yang diberikan dalam bentuk barang maupun jasa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi internal kementerian/lembaga.</i>	
				231	EBB		<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i> <i>Satuan: Unit, m2, paket</i>	RO Generik menggunakan nomenklatur: 951 Layanan Sarana Internal 971 Layanan Prasarana Internal
							<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal adalah layanan yang dilakukan dalam rangka pemberian fasilitas sarana (umumnya merujuk pada benda bergerak) dan prasarana (umumnya benda tidak bergerak atau bangunan) dalam menunjang pelaksanaan tugas pegawai internal organisasi</i>	

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
F				232	EBC		Layanan Manajemen SDM Internal Satuan: Orang, Layanan, Rekomendasi	RO Generik menggunakan nomenklatur: 954 Layanan Manajemen SDM 996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan 968 Layanan Pendidikan Kedinasan
							Layanan Manajemen SDM Internal merujuk pada layanan pengelolaan sumber daya manusia, meliputi perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dan karir, pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi, kompetensi, dan kapasitas pegawai dalam bentuk pendidikan maupun pelatihan, serta administrasi kepegawaian.	
				233	EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal Satuan: Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	RO Generik menggunakan nomenklatur: 952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 955 Layanan Manajemen Keuangan 965 Layanan Audit Internal 961 Layanan Reformasi Kinerja 974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 975 Layanan Manajemen Kinerja
							Layanan manajemen kinerja internal merujuk pada layanan pengelolaan kinerja, meliputi layanan terkait penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran; pengelolaan informasi, rekaman, kearsipan dan dokumentasi kegiatan; penyelenggaraan hubungan masyarakat, pengelolaan dan pemeriksaan keuangan, serta pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian atas penyelenggaraan tugas dan fungsi internal organisasi.	
	Administrasi Pemerintahan internal Pemerintahan (antar KL dan antar Pem Pusat Daerah)	A	Tata Kelola Pemerintahan	234	FAA	UAA	Kearsipan Satuan: Arsip	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis barang yang diarsipkan, atau bentuk/jenis/perihal/bidang layanan pengelolaan arsip. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Arsip ... - Dokumen ...
							Kearsipan adalah barang dan/atau jasa pengelolaan yang berkaitan dengan rekaman atau dokumentasi kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat, diterima, dikelola dan dimusnahkan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L atau publik.	Contoh: - Arsip Naskah Kepresidenan - Arsip Histori Pembangunan Nasional

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				235	FAB	UAB	Sistem Informasi Pemerintahan Satuan: Sistem Informasi	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/bidang/perihal sistem informasi atau aplikasi pemerintahan yang dikembangkan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Sistem Informasi... - Sistem Aplikasi...
							<i>Sistem Informasi Pemerintahan merujuk pada serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik yang dikembangkan, dikelola dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat.</i>	Contoh: - Sistem Informasi Administrasi Kependudukan - Sistem Aplikasi KPU
				236	FAC	UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara Satuan: Orang	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis layanan peningkatan kapasitas aparatur negara yang diberikan, serta perihal/bidang dari pelatihan/seminar/bimbingan teknis yang diberikan. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan informasi mengenai klasifikasi jabatan yang mendapatkan layanan peningkatan kapasitas tersebut. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pelatihan ... - Bimbingan Teknis ...
							<i>Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara merujuk pada layanan peningkatan kapasitas aparatur negara dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi antar kementerian/lembaga dan pusat dan daerah, yang mencakup peningkatan kapasitas ilmu terapan, keahlian, manajerial dan keterampilan, yang diselenggarakan dalam bentuk pelatihan, seminar, bimbingan teknis, kursus, dan penataran dan tidak mencakup pendidikan formal.</i>	Contoh: - Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penyuluhan Keuangan Daerah - Pelatihan Dasar CPNS

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				237	FAD	UAD	Perencanaan dan Penganggaran Satuan: Layanan, Dokumen	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk atas dokumen hasil (barang) atau layanan (jasa) dari perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Rencana Pembangunan - Rencana Kerja.... - Rencana Strategis.... - Rencana Kerja dan Anggaran ... - Pagu Indikatif/Anggaran/Alokasi Anggaran
							<i>Perencanaan dan Penganggaran merujuk pada penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pemerintahan pusat maupun pemerintah pusat dengan daerah, termasuk namun tidak terbatas pada layanan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, penelaahan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, serta penelaahan usulan Dana Alokasi Khusus yang merupakan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas</i>	Contoh: - Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek - Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
				238	FAE	UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Satuan: Laporan, Layanan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal layanan pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan yang diberikan. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan fungsi dan tugas unit/institusi pemerintahan yang dipantau, dievaluasi atau dilaporkan Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemantauan dan Evaluasi... - Layanan Monitoring ... - Pemantauan dan Evaluasi/Monitoring....
							<i>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan merujuk pada layanan pemantauan; pengamatan; pencatatan; pemantauan; penilaian serta pelaporan dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan</i>	Contoh: - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Ketahanan keluarga dan Rentan - Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program, dan Dokumentasi Kebijakan Informasi Kependudukan
				239	FAF	UAF	Pemeriksaan Keuangan Negara Satuan: Laporan, Layanan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/perihal/bidang atas layanan pemeriksaan keuangan negara yang diberikan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pemeriksaan - Laporan Hasil Pemeriksaan ...

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
							<i>Pemeriksaan Keuangan Negara merujuk pada layanan pemeriksaan atas keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional oleh instansi yang berwenang berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara</i>	Contoh: - Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan
				240	FAG	UAG	Pengawasan Pembangunan Satuan: Laporan, Layanan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/perihal/bidang atas layanan pengawasan pembangunan yang diberikan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pengawasan - Laporan Hasil Pengawasan ...
							<i>Pengawasan Pembangunan meliputi layanan pengawasan pelaksanaan pembangunan nasional oleh Pemerintah atas pengelolaan Keuangan, dengan penerima manfaat output adalah eksternal K/L.</i>	Contoh: - Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman - Laporan Hasil Pemeriksaan Pembangunan Proyek Prioritas Nasional
				241	FAH	UAH	Pengelolaan Keuangan Negara Satuan: Layanan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/perihal/bidang atas layanan pengelolaan keuangan negara yang diberikan. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pengelolaan ...
							<i>Pengelolaan Keuangan Negara adalah pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta peraturan perundang-undangan lain di bawahnya</i>	Contoh: - Layanan Pengelolaan Perbendaharaan
				242	FAI	UAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan Satuan: Lembaga	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan bentuk/jenis/perihal/bidang dari layanan peningkatan manajemen lembaga pemerintah. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan klasifikasi/bidang/lingkup dari lembaga pemerintahan yang mendapatkan layanan peningkatan manajemen sebagaimana dimaksud. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pembinaan ... - Layanan Peningkatan Manajemen - Layanan
							<i>Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan merujuk pada barang dan/atau jasa yang dihasilkan dalam upaya Pemerintah guna memenuhi kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.</i>	Contoh: - Layanan Pembinaan Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah - Layanan Pengembangan dan Revitalisasi KUA - Layanan Peningkatan Kompetensi Penghulu

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
				243	FAJ	UAJ	Benda Meterai dan Cukai Satuan: Keping, Lembar	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk benda meterai dan cukai yang disediakan Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Benda Meterai - Pita Cukai
							<i>Benda Meterai dan Cukai merujuk pada keluaran (output) berupa meterai dan cukai</i>	Contoh: - Benda Meterai - Pita Cukai
				244	FAK	UAK	Pengelolaan Aset BUN Satuan: Unit, Aset	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/perihal/aspek dari layanan pengelolaan aset BUN. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan Pengelolaan ... - Perjanjian Pengelolaan ... - Layanan
							<i>Pengelolaan Aset BUN merujuk pada layanan pengelolaan aset dan kekayaan negara oleh bendahara umum negara</i>	Contoh: - Layanan Pengelolaan Aset BUN - Perjanjian Pengelolaan Aset
				245	FAL	UAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan Satuan: Dokumen, Kegiatan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/perihal/bidang/aspek atas layanan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pembiayaan Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Layanan.....
							<i>Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan merujuk pada layanan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pembiayaan, termasuk pengelolaan risiko pembiayaan</i>	Contoh: - Layanan Optimalisasi Kas Pemerintah - Layanan Pembiayaan Proyek melalui SBSN
				246	FAM	UAM	Hasil Kelolaan Dana Satuan: Rupiah, Hektar, Orang, Usaha Mikro, milyar, Dokumen, Kilo liter	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/perihal/bidang atas hasil pengelolaan dan pemanfaatan dana. Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pendanaan
							<i>Hasil Kelolaan Dana merujuk pada keluaran hasil pengelolaan dan pemanfaatan dana</i>	Contoh: - Pendanaan Promosi dan Kemitraan Sawit - Pendanaan Penyaluran Beasiswa

Kode Grup	Grup KRO	Kode Jenis	Jenis KRO	No.	Kode KRO (Non PN)	Kode KRO (PN)	KRO	CONTOH PENUANGAN RO
		B	Pembinaan Pemerintah Daerah dan Desa	247	FBA	UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Satuan: Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal atas layanan fasilitasi dan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lingkup pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pembinaan... - Fasilitasi...
			<i>Pembinaan Pemerintah Daerah merujuk pada layanan yang diberikan guna meningkatkan pemahaman, memberikan pendampingan, pembinaan umum, asistensi serta konsultasi terhadap Pemerintah Daerah dan Desa</i>				<i>Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah merujuk pada layanan fasilitasi dan pembinaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, dan Pemerintah Daerah Kabupaten</i>	Contoh: - Pembinaan Perangkat Daerah - Fasilitasi Penyusunan Pengaturan bidang Sanitasi untuk Pemerintah Provinsi
				248	FBB	UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa Satuan: Desa, Desa/Kelurahan	Nomenklatur RO secara spesifik menyebutkan jenis/bentuk/bidang/perihal atas layanan fasilitasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa. Nomenklatur RO juga dapat ditambahkan lingkup pemerintah desa yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Nomenklatur RO dimulai dengan frase: - Pembinaan... - Fasilitasi...
							<i>Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa merujuk pada layanan fasilitasi dan pembinaan yang diberikan kepada Pemerintah Desa</i>	Contoh: - Pembinaan Desa dalam Menerapkan Sistem Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis ITE - Pembinaan Kepala Desa dalam Menyusun Kelembagaan Satlinmas



a.n. Menteri PPN/Kepala Bappenas
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

Scander Clasein Hasudungan Siahaan



a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Anggaran

Isa Rachmatarwata